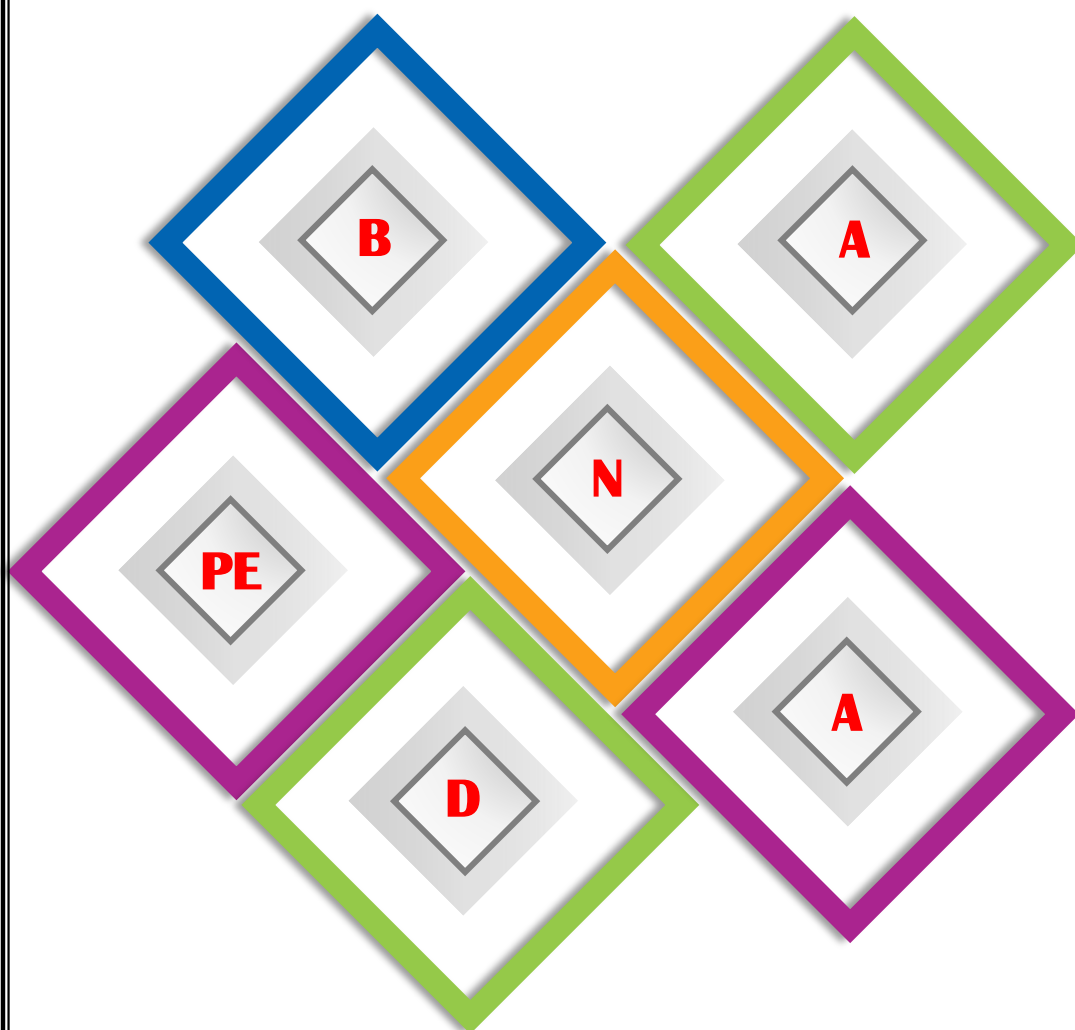




BAPENDA
SUMATERA SELATAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2025 TRIWULAN II

**BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN JL. POM IX KAMPUS PALEMBANG**
TELP. 0711 – 310633 FAX 0711 – 319819 KODE POS 30137



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Periode Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun anggaran 2025 Triwulan II (April – Mei - Juni) merupakan periode awal pelaporan kinerja jangka menengah 2024 – 2026.

Tujuan dan sasaran strategis pendapatan daerah merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu kinerja outcome/impact dari beberapa program nomenklatur, kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran pendapatan dalam Dokumen Perencanaan Kinerja dan memperhatikan permasalahan (*strategic issue*) dan capaian pendapatan daerah serta menjabarkan tujuan dan sasaran strategis dalam Dokumen Perencanaan Kinerja. Dengan berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian/kesinambungan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja Badan Pendapatan Daerah serta dinamika perkembangan perekonomian baik dalam skala regional maupun nasional

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Perangkat Pemerintah Daerah mengemban tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang keuangan sub pendapatan daerah.

Sebagai perangkat daerah di bidang pemungutan Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang ada. Dalam melaksanakan kewenangan untuk melakukan pengelolaan dan pemungutan Pendapatan Daerah, khususnya pemungutan pajak-pajak daerah provinsi telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Seiring tuntutan agar setiap organisasi publik selalu terbuka dan transparan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka organisasi publik harus membuat suatu Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah (Strategik Plan), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan menyusun dokumen perencanaan kinerja diharapkan organisasi mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik dan lebih fokus. Dokumen Perencanaan Kinerja ini antara lain berisikan ringkasan dari rencana strategis dan uraian lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik dan strategi pencapaiannya.

Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang harus dijalankan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang tertuang di dalam Dokumen Perencanaan untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah demi mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

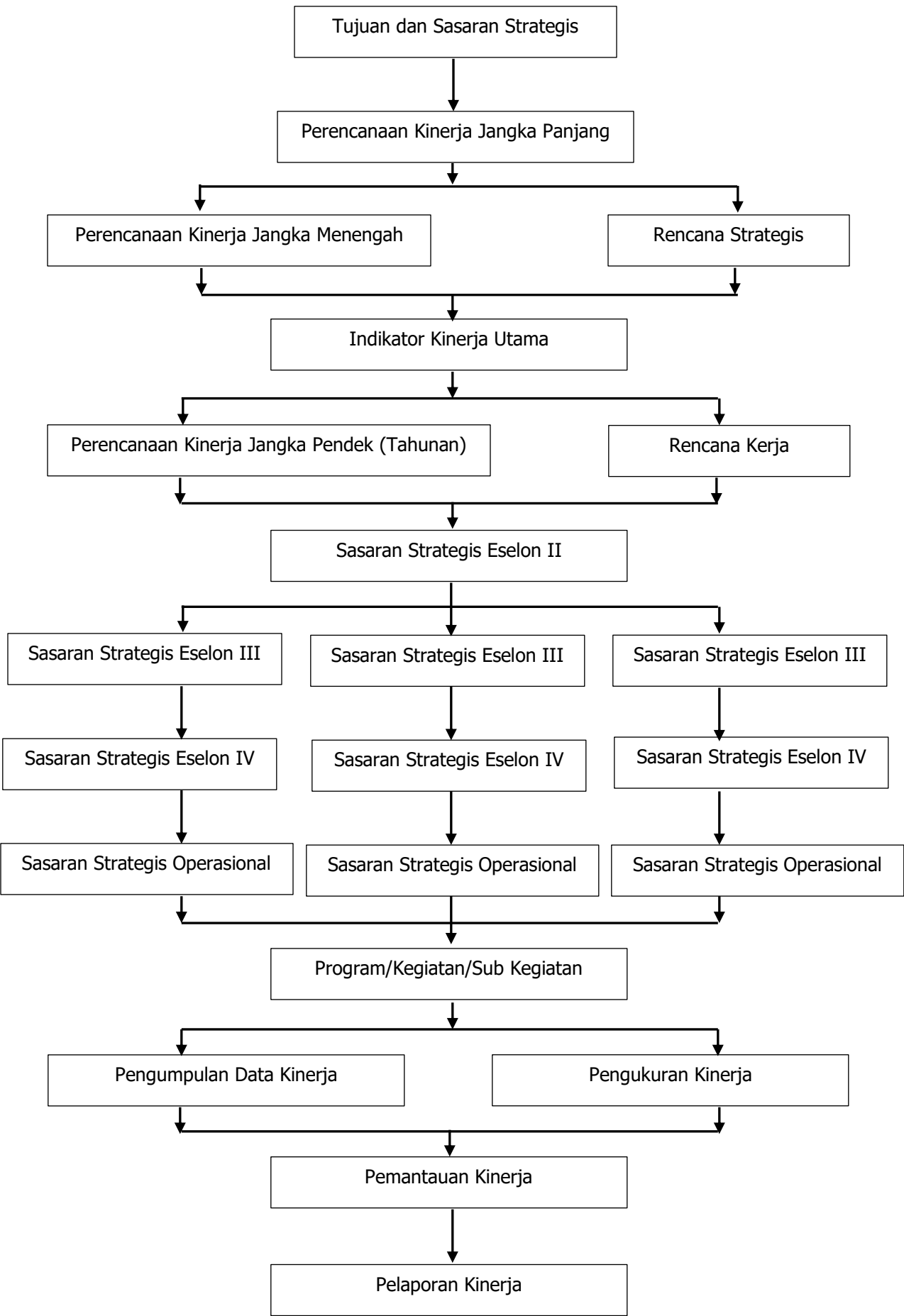
Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan kondisi realisasi kinerja dari tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah dalam kurun waktu jangka pendek. Dokumen ini menyediakan dasar bagi *core business* organisasi secara *sustainable* untuk meningkatkan kinerja dari organisasi dan menyediakan kerangka untuk rencana kinerja tahunan selanjutnya.

Penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dari sebuah sistem penganggaran dari Perangkat Daerah. Kaitan dengan anggaran berbasis kinerja tetap harus dipertimbangkan dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran strategis serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem penganggaran. Anggaran Perangkat Daerah dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan sehingga tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya juga harus disesuaikan dengan perubahan anggaran tersebut.

Dalam upaya menggali dan memanfaatkan segenap potensi yang ada di bidang Pendapatan Daerah yang dalam pelaksanaannya telah diatur

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kesemuanya itu bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan serta mempunyai kontribusi positif bagi pertumbuhan perekonomian Sumatera Selatan.

Sehingga secara sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan rangkaian proses yang terstruktur dan terarah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan sub urusan pendapatan. Adapun bagan alir proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tergambar pada bagan alir berikut ini:



B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Struktur Organisasi

Secara rinci tugas, pokok, fungsi dan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang keuangan sub pendapatan daerah.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi:

- Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijakan teknis serta program kerja;
- Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan Pendapatan Daerah;
- Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, tata usaha, umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
- Pengkoordinasian yang meliputi segala usaha yang berhubungan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta perundang-undangan yang berlaku;
- Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

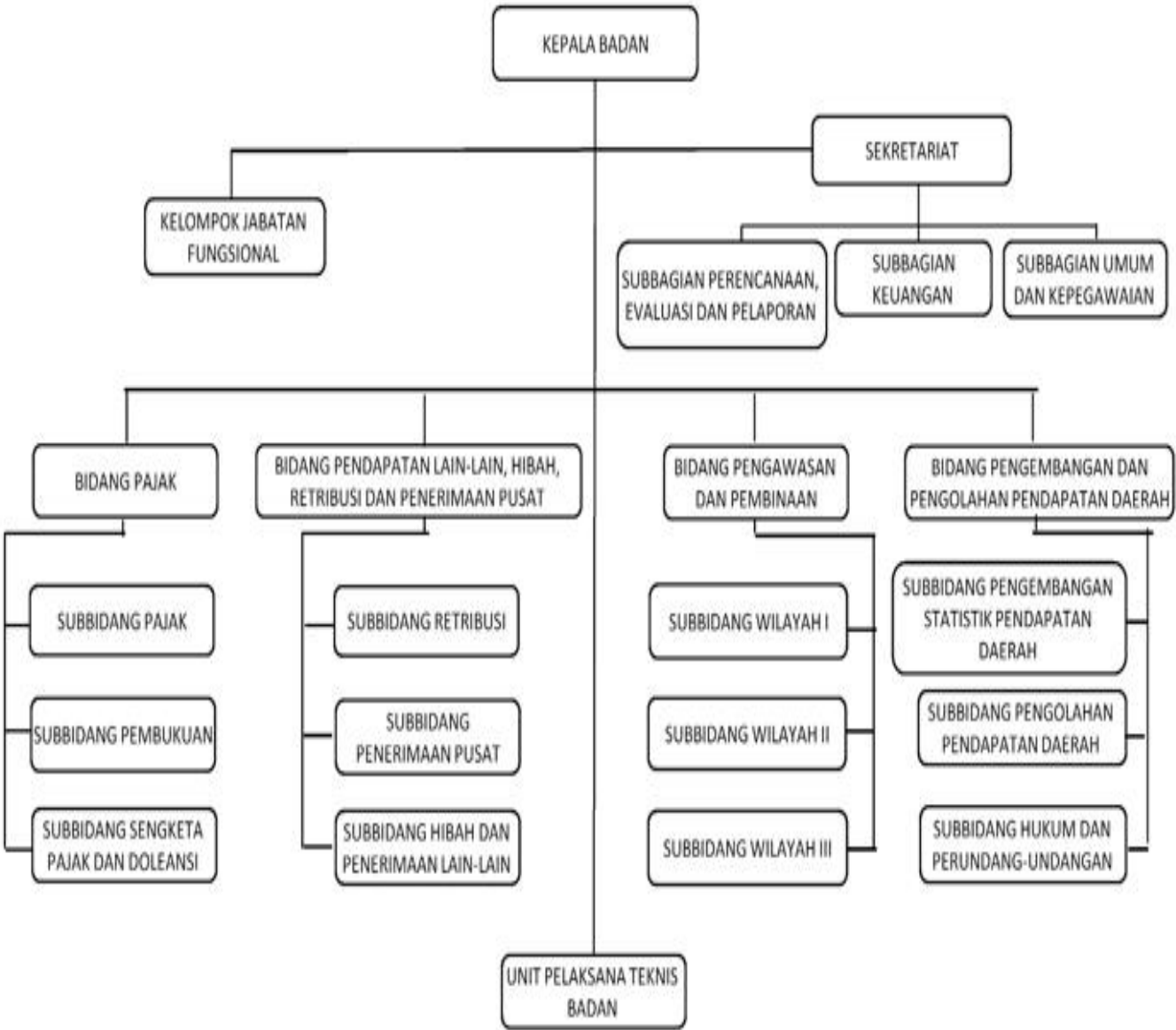
3. Struktur Organisasi

Dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan

berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 dimana struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah disusun sebagai berikut:

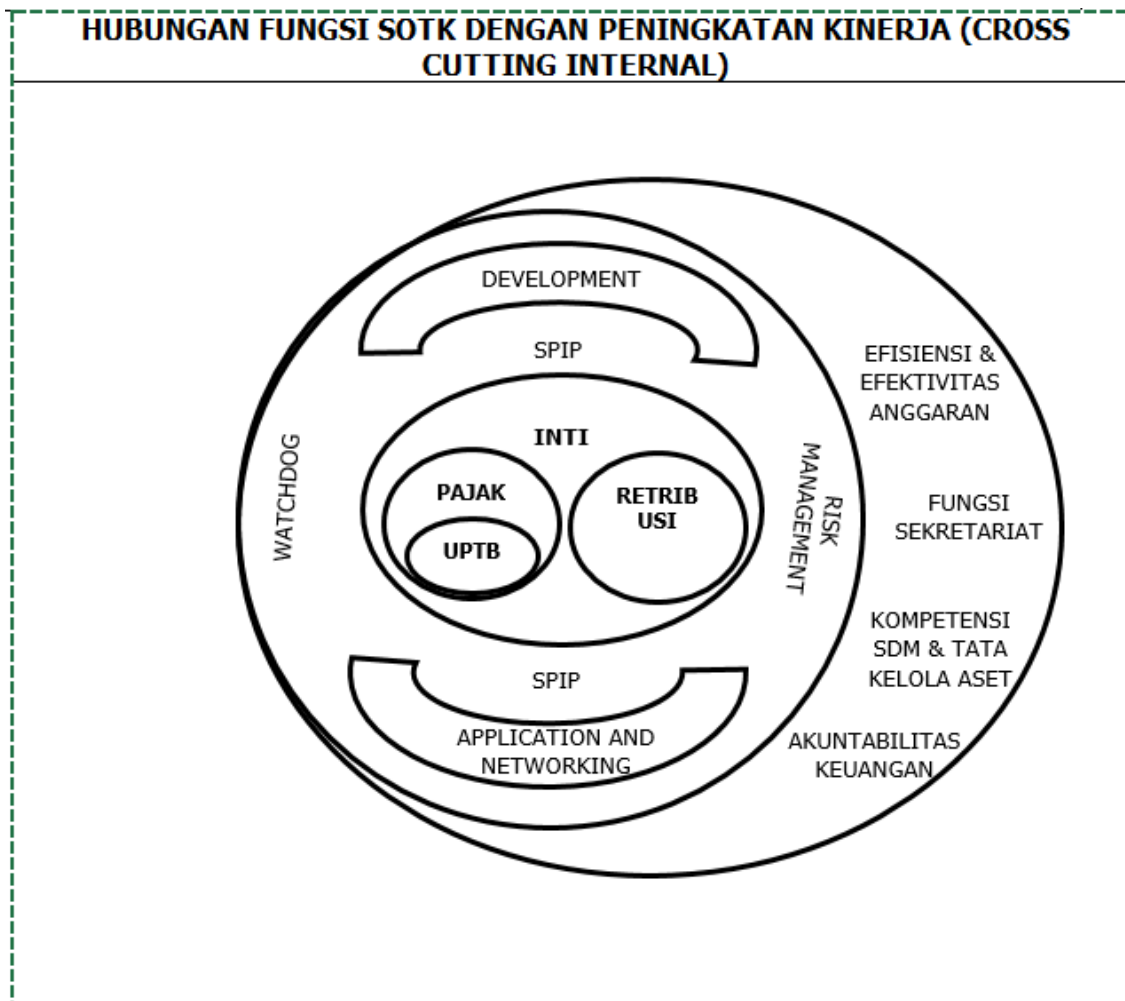
- Kepala Badan
- Sekretariat, membawahi:
 - Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - Subbagian Keuangan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
- Bidang Pajak, membawahi:
 - Subbidang Pajak
 - Subbidang Pembukuan
 - Subbidang Sengketa Pajak dan Doleansi
- Bidang Pendapatan Lain-lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat membawahi:
 - Subbidang Retribusi
 - Subbidang Penerimaan Pusat
 - Subbidang Hibah dan Penerimaan Lain-lain
- Bidang Pengawasan dan Pembinaan, membawahi:
 - Subbidang Wilayah I
 - Subbidang Wilayah II
 - Subbidang Wilayah III
- Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah, membawahi:
 - Subbidang Pengembangan Statistik Pendapatan Daerah
 - Subbidang Pengolahan Pendapatan Daerah
 - Subbidang Hukum dan Perundang-undangan
- Unit Pelaksana Teknis Badan
- Kelompok Jabatan Fungsional

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Tata Kerja

Yang dimaksud tata kerja dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini adalah terciptanya hubungan kerja yang kolaboratif antar unit kerja (*internal cross cutting*) untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Hubungan tata kerja yang kolaboratif tersebut digambarkan pada gambar berikut :



Hubungan tata kerja (*internal cross cutting*) sebagai berikut :

1. Bidang Pajak – Bidang P2PATDA Kolaborasi

Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah (P2PATDA) dengan Bidang Pajak, dimana Bidang P2PATDA menggali potensi melalui analisa pengembangan terhadap sumber – sumber dan inovasi dalam pajak daerah, sementara Bidang Pajak membuat kebijakan di sektor pajak antara lain tax amnesty, tax holiday, tax

Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah (P2PATDA) dengan Bidang Pendapatan Lain Lain, dimana Bidang P2PATDA menggali potensi melalui analisa pengembangan terhadap sumber – sumber dan inovasi dalam retribusi daerah, sementara Bidang Retribusi membuat kebijakan di sektor retribusi antara lain kemudahan dan transparansi dalam pengelolaan retribusi.

2. Bidang Pajak – Bidang Wasbin Kolaborasi

Bidang Pengawasan dan Pembinaan (Wasbin) melakukan pengawasan, pengendalian intern, pemeriksaan terhadap pemungutan pajak daerah sehingga mengurangi risiko atas kesalahan dan berakibat menimbulkan kerugian daerah dalam pengelolaan pajak daerah.

3. Bidang Pajak – UPTB Puslia Kolaborasi

UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi (Puslia) menjalankan kebijakan di sektor pajak daerah (Bidang Pajak) dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen di Bidang Pajak, antara lain Sistem Pembayaran Pajak melalui e Dempo, SOS, e signal, SIAPO, e PAP, e PAB, Sistem Pembayaran Pajak melalui e commerce (Tokopedia, Indomaret).

4. Bidang Wasbin – UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kolaborasi

Bidang Pengawasan dan Pembinaan (Wasbin) melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara intensif atau secara berkala kepada UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan dan penetapan pajak daerah.

5. Dan lain lain Bentuk Kolaborasi Antar Unit Kerja

Sekretariat sebagai koordinator, melakukan internal cross cutting terhadap semua Bidang/UPTB untuk pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), kebutuhan anggaran serta kebutuhan sumber daya lainnya dalam meningkatkan kinerja tujuan dan sasaran sasaran strategis Perangkat Daerah.

Hubungan tata kerja (*eksternal cross cutting*) sebagai berikut :

Kelompok sasaran layanan yang menjadi mitra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan antara lain kelompok sasaran wajib pajak kendaraan, perusahaan swasta, BUMN dan BUMD. Dukungan stakeholder yang menjadi mitra Bapenda sangat diperlukan sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah, antara lain :

A. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi mitra Bapenda dalam hal register nomor kendaraan bermotor.

B. Jasa Raharja

Penggunaan sebagian dana Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dari wajib pajak dapat digunakan sebagai bentuk *corporate social responsibility* untuk kegiatan memberikan pelayanan di samsat.

C. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Penggunaan data terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan sangat memudahkan bagi petugas samsat untuk melihat data tunggakan pajak kendaraan, pajak progresif dan lain sebagainya.

D. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan sebagai mitra Bapenda dapat berkontribusi terhadap penyediaan data kendaraan sebagaimana diatur dalam Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 49431) untuk jenis angkutan barang umum dengan rekomendasi TNKB Umum serta penggunaan kendaraan dengan nomor kendaraan di luar Provinsi Sumatera Selatan lebih dari 90 hari beroperasi di Sumatera Selatan dapat dilakukan mutasi masuk ke Provinsi Sumatera Selatan.

E. OPD Pemangku Retribusi

Beberapa OPD yang secara kewenangannya sebagaimana amanat Undang – undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain : Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Bappeda, Pertanian TPH, Ketahanan Pangan dan Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Energi Sumber Daya Mineral, Perkebunan, Perdagangan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesehatan, Pendidikan, PU Bina Marga dan Tata Ruang, Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata, BPSDM, Badan Penelitian dan Pengembangan serta BPKAD.

Sebagai OPD yang mengelola pendapatan daerah, Bapenda mendorong OPD pemangku retribusi untuk berinovasi menggali sumber – sumber retribusi yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

F. BUMN/BUMD/BUMS

Keberadaan BUMN/BUMD/BUMS sebagai pihak yang bermitra dengan Bapenda memberikan kontribusi dalam penerimaan pendapatan daerah dari sisi penerimaan pajak air permukaan serta penyertaan modal bagi BUMD Provinsi Sumatera Selatan.

G. Perbankan

Pihak perbankan dalam hal ini Bank Sumsel Babel sebagai mitra Bapenda dalam hal akuntabilitas penerimaan pajak dan retribusi daerah.

C. **Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama** (*Strategic Issued*)

Aspek strategis keberadaan organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melihat perkembangan dinamika yang ada saat ini, maka perencanaan kemampuan keuangan daerah dalam pembangunan daerah memerlukan pendanaan dan pembiayaan yang bersumber pada kemampuan fiskal daerah melalui sumber – sumber pendapatan daerah. Kemandirian otonomi daerah dalam hal mengatur, mengurus dan mengelola kemampuan keuangan daerah yang tercermin pada pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana amanat Undang – undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dimana Pendapatan Daerah merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas, dan akuntable. PAD memegang peranan yang sangat penting dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD, maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu, semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat.

Sementara mobilisasi pendapatan (*revenue mobilization*) daerah merupakan salah satu strategi yang mencerminkan kemandirian otonomi daerah dalam mendanai pembangunan dengan mengutamakan sumber-sumber penerimaan daerah antara lain Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai kewenangan untuk memungut Pajak Provinsi yang meliputi : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Sementara permasalahan-permasalahan (*Strategic Issued*) yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan Internal

1.a Tata kelola organisasi belum optimal;

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi UPTB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan adanya dua peraturan ini semestinya pengelolaan organisasi terutama terkait pemerataan pegawai/sumber daya manusia pada seluruh unit kerja/UPTB bisa dioptimalkan, namun kondisi pada saat ini belum bisa optimal dikarenakan belum meratanya distribusi pegawai/SDM pada seluruh unit kerja/UPTB Bapenda.

1.b Belum optimalnya upaya intensifikasi pendapatan daerah diluar pajak

Apabila dilihat dari pencapaian penerimaan pendapatan daerah pada komponen PAD tahun 2023, kontribusi terbesar adalah sektor pajak dengan rata-rata kontribusi 91,31% sedangkan non pajak hanya berkontribusi 8,69 %. Dari komposisi pembentuk PAD ini dapat diketahui bahwa PAD Prov.Sumsel sangat bergantung pada sektor pajak, sementara kontribusi dari retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (pengelolaan BUMD) masih jauh dari kondisi yang diharapkan. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya pengelolaan

pendapatan sektor non pajak terutama sektor retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (BUMD), sehingga dibutuhkan upaya, inovasi dan kebijakan yang tepat untuk dapat mengoptimalkan potensi sumber PAD dari retribusi dan pengelolaan BUMD.

1.c Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi

Kemajuan teknologi selayaknya dapat kita manfaatkan untuk mempermudah seluruh aktivitas, begitu juga dengan pengelolaan pendapatan daerah. Kebutuhan akan sistem/aplikasi yang mumpuni mutlak diperlukan untuk menunjang pengelolaan pendapatan daerah. Pengelolaan pendapatan daerah dilakukan Bapenda bersama dengan mitra kerja pengelolaan pendapatan daerah yakni institusi Polri, Jasa Raharja dan Bank Sumselbabel dalam pengelolaan SAMSAT. Untuk pengelolaan Non SAMSAT dilakukan bersama institusi Sat POL PP, Perangkat Daerah Pengelola Retribusi dan BUMD. Pembangunan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendapatan daerah mutlak harus dilakukan untuk dapat mengakomodir seluruh kebutuhan institusi mitra pengelolaan pendapatan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pendapatan daerah. Dengan adanya aplikasi/sistem yang mumpuni dengan segala kemudahannya maka akan terwujud pengelolaan pendapatan daerah yang efektif dan efisien yang pada ujungnya akan mampu mendorong pencapaian pendapatan daerah. Saat ini Aplikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dikembangkan masih tentang pada pengelolaan Samsat, Untuk pengelolaan Non Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dikembangkan.

1.d Perlu adanya revisi Peraturan Daerah terkait belum terakomodirnya upaya-upaya optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah; Retribusi Daerah serta peraturan-peraturan daerah lainnya terkait dengan optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah sehingga diperlukannya kegiatan pemetaan potensi Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah yang akan diakomodir dengan aturan yang berlaku.

- 1.e Kurangnya kualitas dan kinerja Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia yang berkualitas menjadi aspek penting dalam pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya manusia yang berkompetensi dapat memberikan gambaran analisis serta dapat menggali potensi sumber – sumber pendapatan daerah.
- 1.f Pengawasan internal belum berbasis risiko
Manajemen wajib menganalisis risiko-risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi. Manajemen agar memfokuskan pengambilan kebijakan pada kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi. Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan dalam kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap upaya penerimaan Pendapatan Daerah, keuangan, SDM ataupun standarisasi mutu pelayanan. Peran pengawasan dan pembinaan dalam konteks Satuan Pengawas Internal Organisasi sangat diperlukan.
- 1.g Belum optimalnya penerapan dan evaluasi SOP kepada wajib pajak dengan program penjaminan mutu pelayanan
Pelayanan terhadap wajib pajak harus berdasarkan pada standar yang telah ditetapkan. Standarisasi pelayanan di Bapenda Provinsi Sumatera Selatan belum dilakukan dengan baik sehingga perlu dilakukan upaya perumusan, penyusunan, pengaplikasian dan pengevaluasian standar-standar pelayanan yang merupakan bagian dari pengawasan dan pembinaan organisasi.
- 1.h Belum optimalnya sarana prasarana penunjang pelayanan wajib pajak.
Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Bapenda Provinsi Sumatera Selatan dan UPTB masih belum sesuai standar yang berlaku.
- 1.i Peta proses bisnis internal belum dilaksanakan secara optimal
Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pencapaian standar Bapenda Provinsi Sumatera Selatan.

Peta proses bisnis mengumpulkan seluruh informasi dengan melibatkan seluruh elemen organisasi untuk memastikan akurasi dan kelengkapan proses bisnis disusun. Peta Proses Bisnis menjadi standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan, selain itu peta proses bisnis dapat digunakan untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses menjadi lebih terarah.

- 1.j Jangkauan pemberian pelayanan kepada wajib pajak masih belum optimal.

Luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan dinamika keberadaan wajib pajak yang tersebar di seluruh pelosok wilayah Sumatera Selatan, termasuk wilayah *captive area* menjadikan tantangan tersendiri dalam mengejar target pendapatan daerah dari sisi pajak daerah. Pembentukan unit layanan saat ini sudah 29 unit layanan yang tersebar dalam wilayah 17 kabupaten/kota se Sumatera Selatan dirasakan belum juga optimal dikarenakan berada di pusat kota, sementara jangkauan layanan wajib pajak menyentuh wilayah perairan pedalaman Sumatera Selatan.

- 1.k Belum optimalnya digitalisasi pembayaran pajak daerah

Peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan elektronifikasi pemerintah daerah antara lain digitalisasi pembayaran pajak daerah belum memadai. 7 (tujuh) kanalisasi dalam pembayaran non tunai yang diharapkan oleh Pemerintah Pusat segera terpenuhi pada pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Permasalahan Eksternal

- 2.a Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam mematuhi kewajiban terhadap pembayaran pajak sangat menentukan pencapaian target Pendapatan Daerah. Upaya sosialisasi dan penyuluhan pajak yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir belum banyak meningkatkan kesadaran wajib pajak.

- 2.b Masih rendahnya kontribusi instansi pengelola retribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah;

Dari 15 (lima belas) Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah pada tahun 2023, hanya 8 (delapan) Perangkat Daerah yang capaian realisasinya melebihi target ($>100\%$) dan 7 Perangkat Daerah lainnya tidak mencapai target ($<100\%$). Upaya intensifikasi koordinasi dengan Perangkat Daerah pengelola Retribusi Daerah telah dilakukan secara optimal hal ini ditunjukkan dengan capaian realisasi yaitu sebesar Rp. 9.313.749.306,- (122,52%) dari target sebesar Rp. 7.601.707.223,-.

2.c Iklim ekonomi yang tidak stabil

Adanya pengaruh resesi pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19* sehingga menyebabkan iklim ekonomi masyarakat tidak stabil. Kondisi ini menyebabkan penurunan kemampuan daya beli masyarakat terhadap pembelian kendaraan baru yang berdampak terhadap penerimaan pajak serta terjadinya tunggakan Pajak Daerah sehingga penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah tidak optimal.

2.d Belum optimalnya penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sumbangan pihak ketiga sebagai salah satu unsur penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan penerimaan hibah sehingga tidak dapat ditargetkan. Realisasi penerimaan merupakan hasil pendekatan persuasif kepada BUMN, BUMD ataupun BUMS yang terdapat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

2.e Pengaruh kebijakan nasional dibidang keuangan pusat dan daerah.

Amanat Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pendapatan daerah. Dengan diberlakukannya undang-undang dimaksud, adanya opsen sebagai tambahan pungutan pajak menurut persentase tertentu, Bea Balik Nama (BBN) Mutasi pajak yang di gratiskan, namun ada juga tambahan opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta beberapa potensi retribusi yang hilang di beberapa OPD terkait.

- 2.f Operasional alat angkutan berat atau kendaraan barang banyak yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Selatan.
- Perlu adanya pengaturan operasional angkutan barang dari sisi hulunya, sehingga kendaraan angkutan barang yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Selatan ikut berkontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun

2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
19. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi UPTB di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

E. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan terhadap pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKjIP ini dimaksudkan untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah untuk melaksanakan *good government* karena LKjIP merupakan dasar untuk mengatur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis, dan dapat di pertanggungjawabkan;
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak berkepentingan (*stakeholders*) dengan instansi pemerintah;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.

Uraian maksud diatas menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan program perencanaan strategis dan sekaligus merupakan pengukuran terhadap pelaksanaan dari semua program kegiatan

sehingga dapat mengetahui sampai sejauh mana pencapaian kualitas kinerja pada tahun 2022.

Sementara tujuan disusunnya LKjIP ini adalah sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selain itu penyusunan LKjIP juga mengacu dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyajian penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 triwulan II pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

Bab I Pendahuluan, pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II Perencanaan Kinerja, pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain – lain yang dianggap perlu



BAB II PERENCANAAN KINERJA



A. Telaaha Visi dan Misi

Perencanaan Kinerja berpedoman pada RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025. Dalam rangka mencapai visi tersebut, maka dilaksanakan dengan upaya 4 (empat) misi yaitu, (1) menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi regional, (2) meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan yang berkelanjutan, (3) mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas, dan (4) meningkatkan kapasitas manajemen pemerintahan.

Arah Pembangunan tahap keempat dalam RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 ini difokuskan untuk memantapkan perwujudan masyarakat Sumatera Selatan yang mandiri, maju, sejahtera, lestari, unggul dan terdepan. Fokus pembangunan ini dilaksanakan melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Sumatera Selatan yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sesuai fokus pembangunan maka arah pembangunan tahap IV melingkupi beberapa poin sebagai berikut:

1. Memantapkan pertumbuhan ekonomi dan menegaskan arah pembangunan ekonomi
2. Memantapkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
3. Pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan
4. Pembangunan pemerintahan yang adil, jujur, bersih, dan bertanggung jawab

Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berkaitan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah: Misi ke 3 (tiga) "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif". Selanjutnya misi ke 3 (tiga) telah dijabarkan dalam beberapa program kerja sebagai berikut :

1. Membangun hubungan administrasi pemerintah yang lebih harmonis dengan Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan sebagai bagian dari proses reformasi birokrasi.
2. Mendorong pengutamaan kepentingan publik oleh pelayanan publik dengan pelayanan birokrasi yang berbasis teknologi informasi.
3. Revitalisasi infrastruktur pelayanan publik, baik secara manual maupun online.
4. Membangun jaringan interkoneksi layanan publik yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, yang bisa di akses oleh publik secara online 24 jam/hari, 7 hari/minggu.
5. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah di semua bidang.
6. Menciptakan pelayanan publik secara terpadu, cepat dan mudah.
7. Melibatkan unsur LSM/Ormas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh lembaga pemerintahan.
8. Mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintahan dalam rangka pencegahan terhadap tindak korupsi dan tindakan penyelewengan guna menciptakan pemerintahan yang baik (*good government*).
9. Menempatkan posisi semua *stakeholder* (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bupati dan Walikota) di Sumatera Selatan dalam satu kepentingan pembangunan Sumatera Selatan Maju.
10. Memfasilitasi forum kepala daerah se-Sumatera Selatan dengan menjadwalkan pertemuan rutin dalam jangka waktu tertentu.
11. Melakukan kunjungan ke semua daerah secara berkala untuk penyerapan aspirasi dan mendorong keunggulan potensi masyarakat.
12. Melibatkan institusi pendidikan tinggi di daerah sebagai *think tank* pembangunan daerah.
13. Menjadikan lembaga pers dan media massa sebagai mitra dalam pembangunan daerah.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Berdasarkan Visi dan Misi diatas maka tujuan dan sasaran strategis pembangunan bidang Pendapatan Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja jangka menengah atau Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan dalam matriks tahapan sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

1. Unit Eselon II Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon II			TARGET AKHIR
				2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	91,97	92,03	92,21	92,21
2.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi	%	4,00	5,00	6,00	6,00
3.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	%	0,95	0,96	0,98	0,98
		Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	Rasio	1,00	1,12	1,18	1,18

2. Bidang Pajak

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon III Bidang Pajak			TARGET AKHIR
				2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Target Terhadap GDP	%	1,5	1,61	1,73	1,73
2.	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	%	14,26	14,53	14,81	14,81
3.	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	%	5,3	5,19	5,02	5,02
4.	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	%	100	100	100	100

3. Bidang Pendapatan Lain – Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon III Bidang PDLL			TARGET AKHIR
				2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	%	94,97	95,12	95,43	95,43
2.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	%	89,14	89,45	89,78	89,78
3.	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	%	83,48	83,71	83,93	83,93
4.	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	%	84,15	84,42	84,83	84,83

4. Bidang Pengawasan dan Pembinaan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon III Bidang Wasbin			TARGET AKHIR
				2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	%	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2.	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	%	92,46	92,64	92,91	92,91
3.	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	%	17,28	17,03	16,85	16,85
4.	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan dalam Pelaksanaan Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	%	13,02	12,88	12,74	12,74

5. Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon III Bidang P2PATDA			TARGET AKHIR
				2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Penggalian Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	%	81,63	81,89	82,19	82,19
2.	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	%	83,48	83,69	83,81	83,61
3.	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	%	93,28	93,41	93,62	93,62
4.	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	%	100	100	100	100

6. Sekretariat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon III Sekretariat			TARGET AKHIR
				2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	%	94,62	94,83	94,96	94,96
		Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	%	5,13	5,02	4,92	4,92
		Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	%	80,61	80,78	80,92	80,92

7. UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon III UPTB Puslia			TARGET AKHIR
				2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	%	62,04	62,34	62,67	62,67
2.	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama	%	91,12	91,32	91,54	91,54
3.	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	%	78,82	78,93	79,21	79,21
4.	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	%	41,23	41,46	41,78	41,78
5.	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	MBPs	100	100	100	100

8. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon III UPTB PPD			TARGET AKHIR
				2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	%	100	100	100	100
2.	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak	%	9,13	8,87	8,62	8,62
3.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	%	9,81	9,72	9,60	9,60

c. **Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja**

Perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan serta sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja diperoleh melalui hasil analisa *cascading* atau penjenjangan pohon kinerja yang dimulai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Mendasari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD), selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2024 – 2026. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dokumen RPD dengan menjawab isu strategis, tantangan dan peluang sektor pendapatan dan permasalahan yang ada. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi RPJMD, dapat dicapai melalui salah tujuan Badan Pendapatan Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan. Tujuan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 - 2026 adalah "Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi".

Indikator pada Tujuan yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 - 2026 disusun sebagai indikator kinerja outcomes dan bukan merupakan indikator kinerja output.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound and continuously improve* (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai

indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Sasaran strategis pendapatan daerah merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu kinerja outcome/impact dari beberapa program nomenklatur, kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran strategis pendapatan dalam RPD Tahun 2024 – 2026 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pendapatan tahun 2019 - 2023 serta menjabarkan tujuan dan sasaran strategis dalam RPD. Dengan berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian /kesinambungan terhadap Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 – 2026.

Berdasarkan dokumen perencanaan kinerja Bapenda yang telah disusun baik untuk jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, maka ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024 akan menjelaskan rumusan hasil indikator kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		JENIS INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah		IKU	92,03 %
2.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi (Nilai absolut)		IKU	5,00
3.	Meningkatnya Kontribusi Terhadap PDRB PAD	1.	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	IKU	0,96
		2.	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	IKU	1,12

2. Indikator Kinerja Sasaran Intermediate Outcomes Level 1 Eselon III

a. Bidang Pajak

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap GDP	Indikator Kinerja Outcomes	1,5 %
2.	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	14,26 %
3.	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	Indikator Kinerja Outcomes	5,3 %
4.	Berkurangnya Kesalahan Dalam Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	Indikator Kinerja Outcomes	100 %

b. Bidang Pendapatan Lain lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	Indikator Kinerja Outcomes	94,97 %
2.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	Indikator Kinerja Outcomes	89,14 %
3.	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	Indikator Kinerja Outcomes	83,48 %
4.	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	Indikator Kinerja Outcomes	84,15 %

c. Bidang Pengawasan dan Pembinaan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	Indikator Kinerja Outcomes	Level 3
2.	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	Indikator Kinerja Outcomes	92,46 %
3.	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	Indikator Kinerja Outcomes	17,28 %

4.	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan dalam Pelaksanaan Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	Indikator Kinerja Outcomes	13,02 %

d. Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya Penggalan Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	81,63 %
2.	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	83,48 %
3.	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	Indikator Kinerja Outcomes	93,28 %
4.	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	Indikator Kinerja Outcomes	100 %

e. Sekretariat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	1.1 Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	Indikator Kinerja Outcomes	94,62 %
		1.2 Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	Indikator Kinerja Outcomes	5,13 %
		1.3 Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	80,61 %

f. UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Indikator Kinerja Outcomes	62,04 %
2.	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama	Indikator Kinerja Outcomes	91,12 %
3.	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	Indikator Kinerja Outcomes	78,82 %
4.	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Indikator Kinerja Outcomes	41,23 %
5.	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	Indikator Kinerja Outcomes	100 MBPs

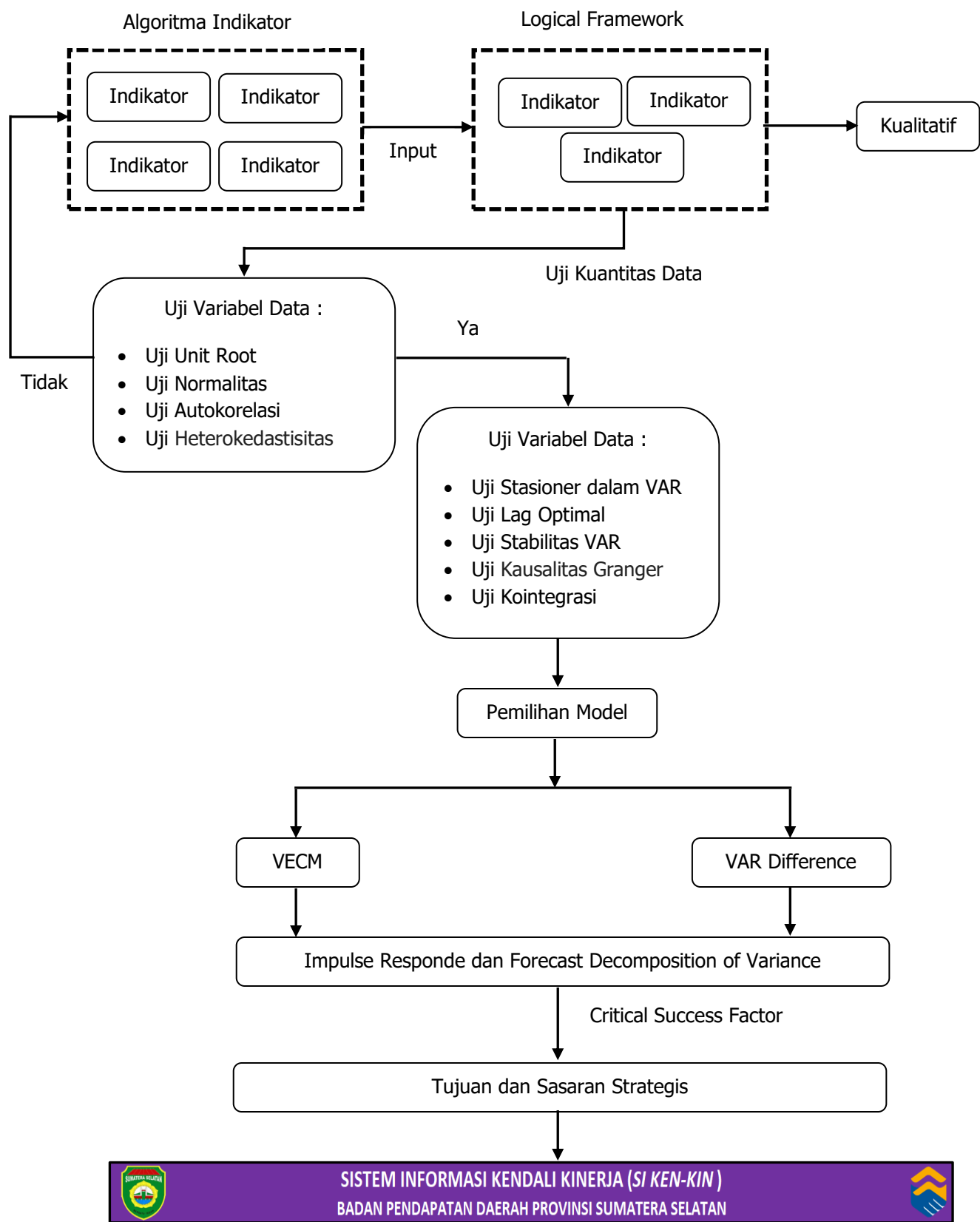
g. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	Indikator Kinerja Outcomes	100 %
2.	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak	Indikator Kinerja Outcomes	9,13 %
3.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	9,81 %

D. Teknik Analisa Data Indikator

Metodologi yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi kinerja, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menggunakan alat dan teknik analisis dengan software eviews versi 13 dan Sistem Informasi Kendali Kinerja (SI KEN-KIN) dengan metodologi sebagai berikut :

1. Melakukan analisis data indikator dengan melakukan pembuktian secara kuantitatif



Pada tahapan ini, semua indikator yang telah disusun berdasarkan penjenjangan atau cascading, mulai dari Indikator Tujuan, Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1, IKSSO Level 2 dan seterusnya sampai dengan indikator kinerja output sub kegiatan.

2. Membuat Indikator Index Level Data

INDEX	INDIKATOR	LEVEL	PEMILIK
IKSS1	Persentase Pencapaian Penerimaan PAD	Sasaran Strategis 1	Kepala Daerah Badan Pendapatan
IKSS2	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Non DAU dan DAK	Sasaran Strategis 2	Kepala Daerah Badan Pendapatan
IKSS3	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi (Nilai absolut)	Sasaran Strategis 3	Kepala Daerah Badan Pendapatan
IKSS4	Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	Sasaran Strategis 4	Kepala Daerah Badan Pendapatan
IKSS5	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	Sasaran Strategis 5	Kepala Daerah Badan Pendapatan
IKSS6	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Sasaran Strategis 6	Kepala Daerah Badan Pendapatan
IKSSO1	Persentase Realisasi Penerimaan Target Terhadap GDP	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala Bidang Pajak
IKSSO2	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala Bidang PDLL
IKSSO3	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan
IKSSO4	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala Bidang P2PATDA
IKSSO5	Persentase Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Sekretaris Badan
IKSSO6	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala UPTB Puslia
IKSSO7	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala UPTB PPD
IKSSO8	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Pajak
IKSSO9	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Doleansi
IKSSO10	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Pembukuan
IKSSO11	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Retribusi
IKSSO12	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Penerimaan Pusat
IKSSO13	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Hibah

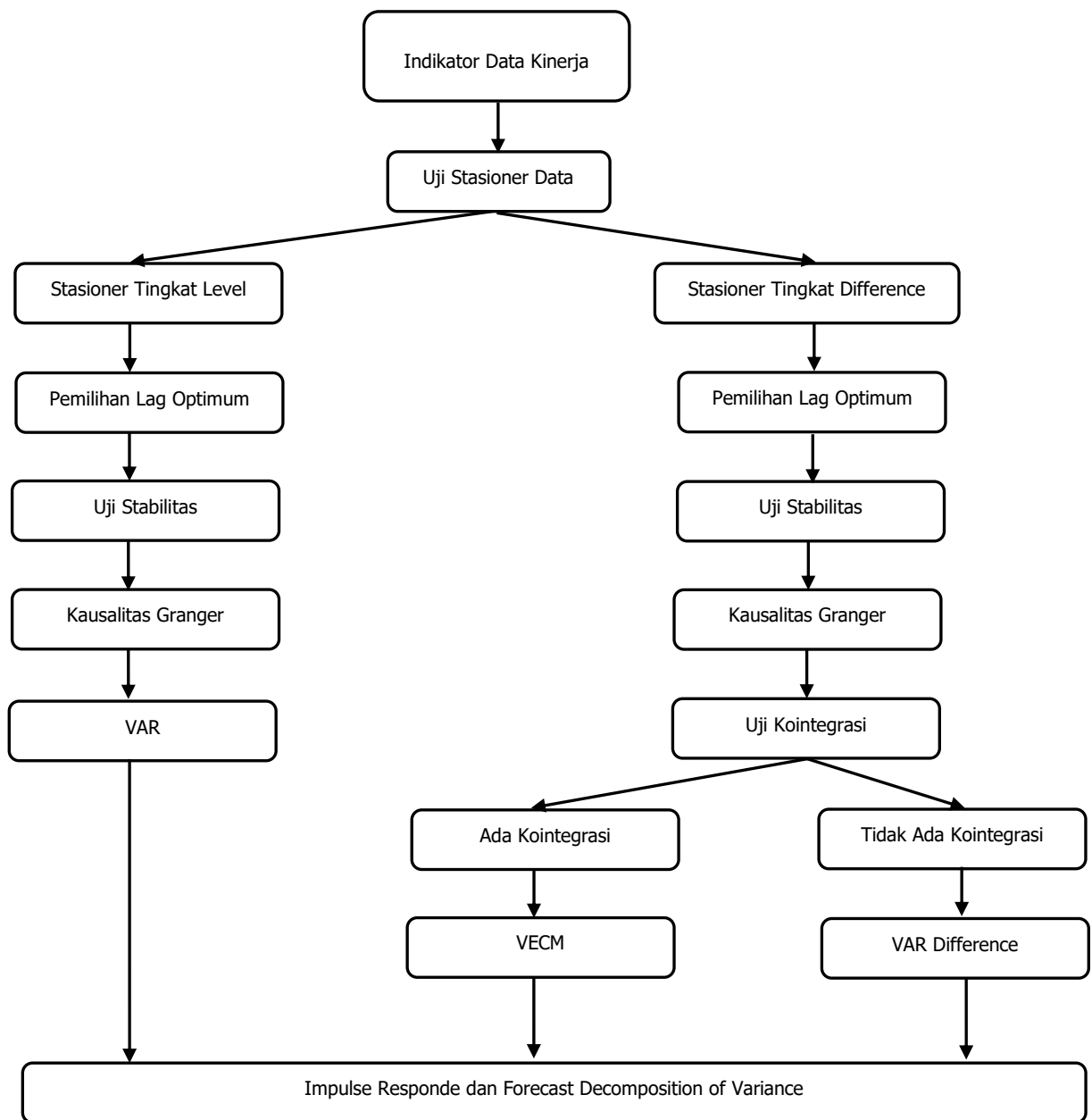
IKSSO14	Persentase Pemeriksaan	Meningkatnya Intensitas	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Subbid Wilayah I
IKSSO15	Persentase Penyelesaian	Berkurangnya Tindak Lanjut	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Subbid Wilayah II
IKSSO16	Persentase Refresif	Berkurangnya Tindakan	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Subbid Wilayah III
IKSSO17	Persentase Objek Penelitian	Meningkatnya Potensi Pendapatan Asli Daerah	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Subbid Statistik
IKSSO18	Persentase Meningkatnya Kerjasama		Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Subbid Pengolahan Pendapatan
IKSSO19	Persentase yang Diharmonisasi	Meningkatnya Peraturan	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Subbid Hukum
IKSSO20	Persentase Pertanggungjawaban Keuangan	Meningkatnya Akuntabilitas	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Subbag Keuangan
IKSSO21	Persentase Penggunaan Anggaran	Efisiensi dan Efektifitas	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Subbag Perencanaan
IKSSO22	Persentase Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Kompetensi	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
IKSSO23	Persentase Meningkatnya Kerjasama		Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Subbag TU UPTB Puslia
IKSSO24	Persentase Digitalisasi	Meningkatnya Penggunaan	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Seksi Jaringan UPTB Puslia
IKSSO25	Persentase Keamanan Data Informasi	Meningkatnya Sistem	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Seksi Keamanan Data dan Informasi UPTB Puslia
IKSSO26	Persentase Pajak	Berkurangnya Tunggakan	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Seksi Penagihan UPTB PPD
IKSSO27	Persentase Perhitungan Penetapan Pajak Daerah	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Seksi Penetapan UPTB PPD

3. Persamaan Data

Untuk melakukan running data, persamaan data pada masing indikator index yang telah ditetapkan harus dilakukan standarisasi dengan computasi data ke logaritma natural (ln) sehingga data mempunyai level pembacaan yang sama pada software eviews versi 13.

4. Tahapan Pemilihan Model

Pemilihan model yang cocok pada kinerja Badan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggunakan metodologi tahapan sebagai berikut :



Metodologi yang digunakan dalam menguji kuantitatif indikator kinerja ini bertujuan untuk melihat hubungan kausalitas (sebab-akibat) dan/atau (jika-maka) antar indikator dalam mendukung tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Teknik analisis yang digunakan dengan *vector error correction model* (VECM) yaitu pengembangan dari vector autoregression model dimana terdapat kointegrasi antar variable.

- Uji Stasioneritas dalam VAR menggunakan uji akar – akar (unit root test) dengan metode Augmented Dickey Fuller Test (ADF Test). Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka data tidak mengandung akar unit yang artinya data stasioner.
- Uji lag optimal dilihat dari nilai Akaike Information Criteria (AIC) yang paling minimum
- Uji stabilitas VAR, stabilitas VAR perlu diuji dahulu sebelum melakukan analisis yang lebih jauh. Model VAR dinyatakan stabil jika rootnya memiliki nilai modulus kurang dari 1 (satu).
- Uji kausalitas granger dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variable endogen dapat diperlakukan sebagai variable eksogen. Hal ini bermula dari ketidaktahuan keterpengaruhannya antar variable. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka ada hubungan kausalitas.

- e. Uji kointegrasi untuk mengetahui apakah akan terjadi keseimbangan dalam jangka panjang yaitu terdapat kesamaan pergerakan dan stabilitas hubungan diantara variable-variabel di dalam metodologi ini atau tidak. Uji kointegrasi dilakukan dengan menggunakan metode Johansen's Cointegration Test. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05 berarti terdapat persamaan kointegrasi yang berarti memiliki keseimbangan jangka panjang.

Model analisis yang digunakan dalam metodologi ini dengan pendekatan hubungan variabel dinamis dengan model faktor koreksi kesalahan (VECM) model, uji stasioner, kausalitas Granger dan kointegrasi yang terdiri dari (1) model pertama akan menjelaskan bagaimana hubungan antara Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes Level 1; (2) model kedua akan menjelaskan bagaimana hubungan antara Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes Level 1 dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes Level 2; (3) model ketiga akan menjelaskan bagaimana hubungan antara Indikator Kinerja Sasaran Strategis Level 1 dan Level 2 secara bersama-sama mempengaruhi Indikator Kinerja Sasaran Strategis.

Uji akar unit pada metodologi ini menggunakan rumusan yang dikembangkan oleh Levin dkk (2002) dan Im dkk (2005). Persamaan uji akar unit Levin dkk (2002) dan Im dkk dengan mempertimbangkan kriteria Augmented Dickey Fuller (ADF test) sebagai berikut :

$$\Delta \ln Y_t = \rho_t Y_{t-1} + \sum_{j=1}^{\rho_t} \delta_{t,j} \Delta \ln Y_{t-j} + \varepsilon_t \quad (1)$$

Dimana : Y merupakan vektor dari variabel endogen utama dalam metodologi ini yaitu tujuan Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1 dan IKSSO Level 2. Uji unit akar oleh Levin dkk. (2002) dengan asumsi bahwa akurasi parameter ρ , identik dalam deret waktu (yaitu, ρ , ρ untuk semua t), sedangkan urutan lag p , dapat bervariasi secara bebas. Prosedur ini menguji hipotesis nol $\rho = 0$ untuk semua t terhadap hipotesis alternatif $\rho < 0$ untuk semua t . Penolakan hipotesis nol menunjukkan kemungkinan dilanjutkannya proses integrasi data dan sebaliknya.

Uji unit akar oleh Im et al. (2005) yang juga berdasarkan persamaan (1), berbeda dengan uji unit akar Levin dkk. (2002), dengan asumsi ρ menjadi heterogen antar bagian. Uji unit akar oleh Im et al. (2005) pengujian hipotesis nol diterima jika $\rho_t = 0$ terhadap hipotesis alternatif $\rho_t < 0$, ($t=1, \dots, t$); $\rho_t = 0$, ($t=t, \dots, t$) untuk semua t . Penerimaan hipotesis alternatif memungkinkan rangkaian individu untuk diintegrasikan. Uji unit root oleh Levin dkk. (2002) dan Im dkk. (2005) dapat diestimasi pada data pada level dan first differential dalam bentuk logaritma natural (ln).

Secara empiris metodologi ini untuk melihat dampak secara kausalitas terhadap Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja

Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1 dan IKSSO Level 2 terhadap tujuan Perangkat Daerah dalam jangka pendek dan panjang, metodologi ini juga menggunakan uji kointegrasi, untuk melihat kemungkinan maksimal uji kointegrasi Johansen (Verbeek, 2012) untuk mengetahui hubungan jangka pendek dan panjang antar variabel-variabel data yang diteliti. Dalam pengecekan Granger analisis kausalitas juga perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik dari hasil pengujian dengan memilih panjang lag optimal yang tepat. Kerangka kointegrasi Johansen mengambil titik awalnya pada model koreksi kesalahan vektor (VECM), sedangkan persamaannya dapat ditampilkan sebagai berikut :

$$x_t = A_1x_{t-p} + \dots + A_px_{t-p} + By_t + \varepsilon_t \tag{2}$$

Dimana: x, adalah vektor variabel data endogen, dan A mewakili matriks autoregresif. y, adalah vektor deterministik dan B mewakili matriks parameter. E adalah vektor inovasi dan p adalah panjang lag.

Untuk mengungkap arah kausalitas antara Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1 dan IKSSO Level 2 terhadap tujuan Perangkat Daerah dalam konteks variabel data. Maka model persamaan kausalitas VECM Granger dapat dilihat sebagai berikut :

$$\Delta \ln IKSS1_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSS1_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSS1_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO1_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO1_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO2_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO2_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO3_t} \theta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO3_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO4_t} \pi_{6t,l} \Delta \ln IKSSO4_{t-l} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \tag{3}$$

$$\Delta \ln IKSSO1_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO1_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO1_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO8_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO8_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO9_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO9_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO10_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO10_{t-l} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \tag{4}$$

$$\Delta \ln IKSSO2_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO2_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO2_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO11_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO11_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO12_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO12_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO13_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO13_{t-l} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \tag{5}$$

$$\Delta \ln IKSSO3_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO3_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO3_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO14_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO14_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO15_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO15_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO16_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO16_{t-l} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \tag{6}$$

$$\Delta \ln IKSSO4_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO4_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO4_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO17_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO17_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO19_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO19_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO20_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO20_{t-l} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \tag{7}$$

$$\Delta \ln IKSSO5_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO5_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO5_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO20_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO20_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO21_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO21_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO22_t} \theta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO22_{t-l} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (8)$$

$$\Delta \ln IKSSO6_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO6_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO6_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO23_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO23_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO24_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO24_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO25_t} \theta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO25_{t-l} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (9)$$

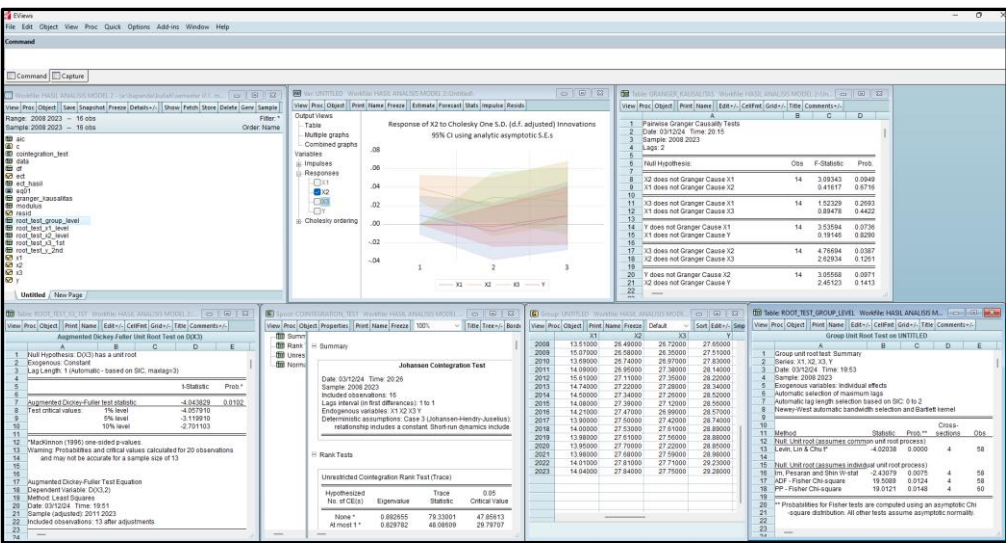
$$\Delta \ln IKSSO7_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO7_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO7_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO26_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO26_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO27_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO27_{t-l} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (10)$$

Dimana t adalah periode waktu ($t = 1, \dots, t$); l lag dari setiap variabel data; $\ln IKSS$ adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis; $\ln IKSSO$ adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes Level 1 dan $IKSSO$ Level 2; EC adalah koreksi kesalahan dan $\varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_3$ mengasumsikan tingkat kesalahan pada model (istilah kesalahan).

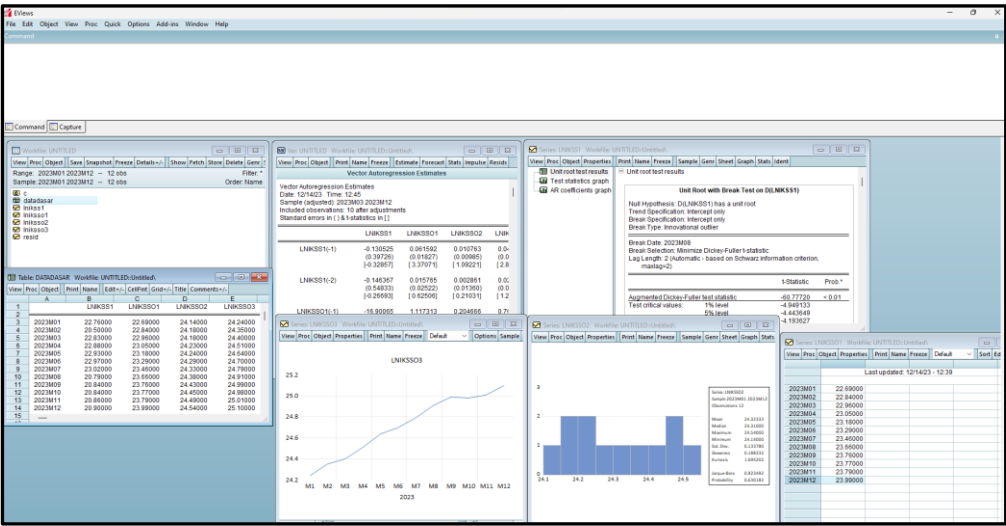
Menurut Lopez & Weber (2017) akan diperoleh beberapa kemungkinan mengenai nilai koefisien masing-masing variabel data tersebut, yaitu (i) misalnya pada persamaan pertama hanya terjadi kausalitas antara $IKSS$ dan $IKSSO$ Level 1 dan $IKSSO$ Level 2 terhadap tujuan Perangkat Daerah, artinya hanya γ_{1t} , 0 (penolakan hipotesis nol), sedangkan semua hipotesis β_{1t} dan $\theta_{1t} = 0$ berarti antara $IKSS$, $IKSSO$ Level 1 dan $IKSSO$ Level 2 dan Y tidak ada hubungan sebab akibat satu sama lain (penerimaan hipotesis nol), hal ini menunjukkan paling sedikit ada satu hubungan atau yang lainnya; (ii) penerimaan hipotesis nol terjadi, jika semua probabilitas berada pada $\gamma_{1t} \beta_{1t} \delta_{1t} = 0$, yang berarti tidak ada satu pun variabel yang memiliki hubungan sebab akibat yang baik dalam arah yang sama (berarah) atau dua arah (dua arah); (iii) penolakan hipotesis nol terjadi, jika terdapat kemungkinan lain, misalnya jika $\gamma_{1t} \beta_{1t} \delta_{1t} \neq 0$, yang berarti semua variabel mempunyai kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dan/atau jika maka baik searah (direksional) maupun dua arah (dua arah).

5. Running Data

Untuk melakukan pengujian terhadap variabel data kinerja yang telah disusun, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan software *evIEWS* versi 13 sebagai berikut :



Gambar 1 Tampilan Awal evIEWS versi 13



Gambar 2 Tampilan Running Data

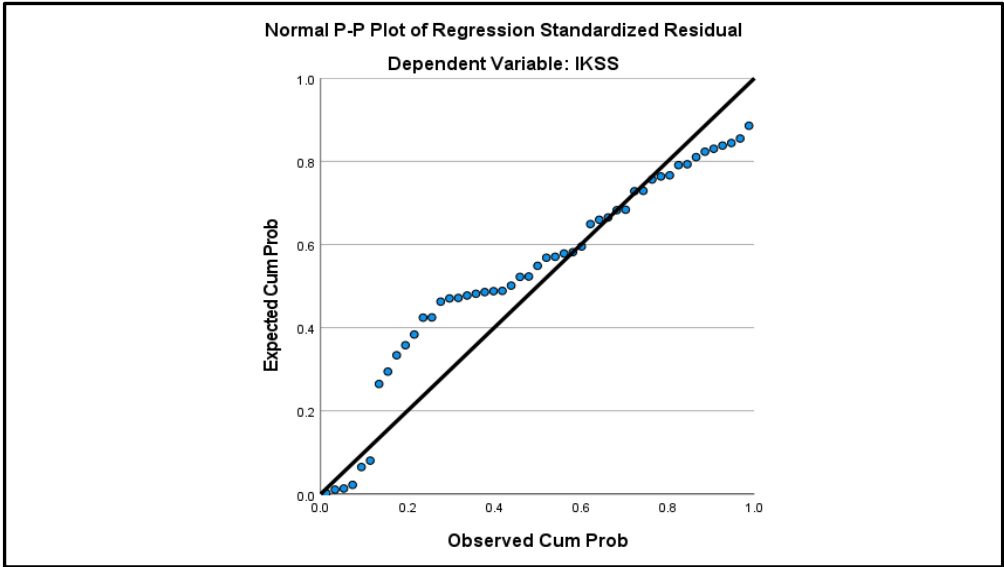
Sebelum mengestimasi kausalitas VECM Granger, beberapa kriteria ekonometrik harus dipenuhi, seperti pengujian stasioner data dengan uji unit root menggunakan kriteria uji Augmented Dickey-Fuller (ADF-Test), pengujian ini dikembangkan oleh Levin et al. (2002) dan Im dkk. (2005). Hasil pengujian unit root dapat dilihat pada Tabel berikut :

Variabel	ADF Test	t-Statistik			Prob*
		1%	5%	10%	
$\Delta (lnIKSS1)$	-6.850925	-3.577723	-2.925169	-2.600658	0.0029
$\Delta (lnIKSS2)$	-7.304150	-3.577723	-2.925169	-2.600658	0.0005
$\Delta (lnIKSS3)$	-7.351302	-3.577723	-2.925169	-2.600658	0.0016
$\Delta (lnIKSS4)$	-7.269643	-3.581152	-2.926622	-2.601424	0.0022
$\Delta (lnIKSS5)$	-7.599555	-3.577723	-2.925169	-2.600658	0.0002
$\Delta (lnIKSS6)$	-5.079018	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0034
$\Delta (lnIKSS01)$	-3.319360	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0401
$\Delta (lnIKSS02)$	-4.298721	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0100
$\Delta (lnIKSS03)$	-5.701658	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0029

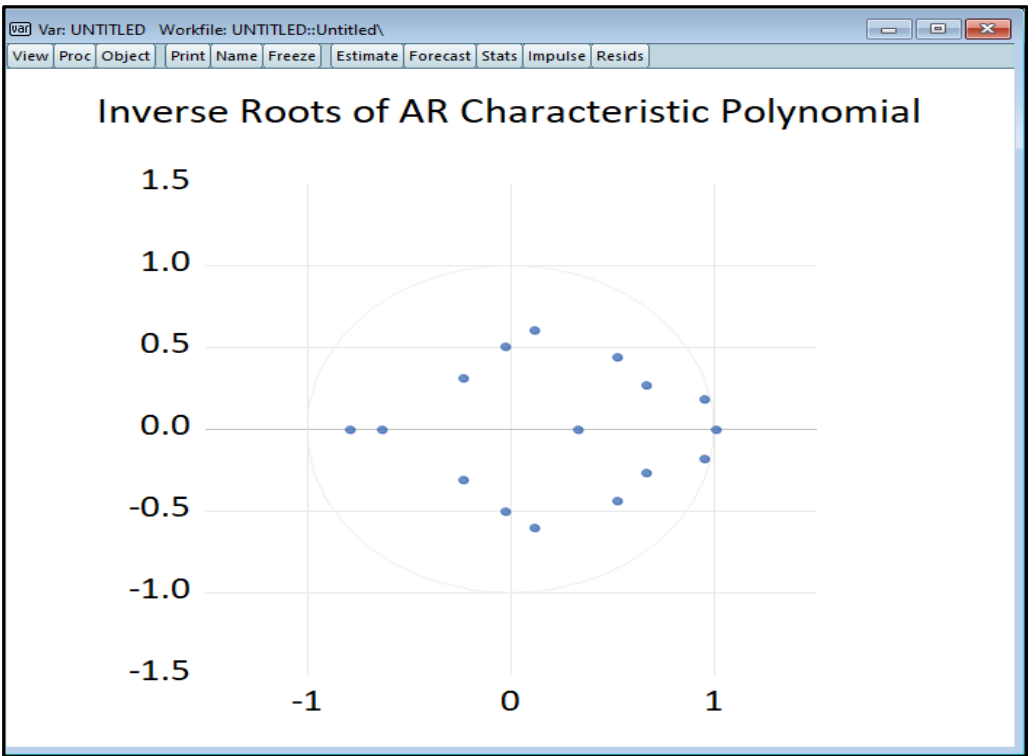
$\Delta (lnIKSSO4)$	-6.556084	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0012
$\Delta (lnIKSSO5)$	-5.986154	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0021
$\Delta (lnIKSSO6)$	-6.120437	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0009
$\Delta (lnIKSSO7)$	-5.033496	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0036
$\Delta (lnIKSSO8)$	-3.719095	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0262
$\Delta (lnIKSSO9)$	-4.650565	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0092
$\Delta (lnIKSSO10)$	-5.877345	-4.803492	-3.403313	-2.841819	0.0034
$\Delta (lnIKSSO11)$	-4.923968	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0042
$\Delta (lnIKSSO12)$	-6.636032	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0001
$\Delta (lnIKSSO13)$	-4.175967	-4.803492	-3.403313	-2.841819	0.0201
$\Delta (lnIKSSO14)$	-3.833980	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0223
$\Delta (lnIKSSO15)$	-5.436816	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0021
$\Delta (lnIKSSO16)$	-3.964601	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0001
$\Delta (lnIKSSO17)$	-4.209333	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0159
$\Delta (lnIKSSO18)$	-3.933559	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0225
$\Delta (lnIKSSO19)$	-7.432736	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0002
$\Delta (lnIKSSO20)$	-5.901626	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0012
$\Delta (lnIKSSO21)$	-6.013486	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0014
$\Delta (lnIKSSO22)$	-5.100250	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0042
$\Delta (lnIKSSO23)$	-3.710393	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0237
$\Delta (lnIKSSO24)$	-3.235105	-4.803492	-3.403313	-2.841819	0.0414
$\Delta (lnIKSSO25)$	-3.464311	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0375
$\Delta (lnIKSSO26)$	-3.509086	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0001
$\Delta (lnIKSSO27)$	-4.621210	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0095

Null Hypothesis : $\Delta(lnIKSS)$; $\Delta(lnIKSSO Level 1)$; $\Delta(lnIKSSO Level 2)$ has a unit root
Lag Length: 0 (Automatic – base on SIC, max lag = 2)
*MacKinnon (1996) one-sided p-values

Tabel diatas menunjukan hasil running test dari pengujian unit root test pada tingkat perbedaan pertama (*first difference*), dimana hasilnya menunjukan nilai probabilitas < 0,05 (*stasioner) hal ini ditunjukan dengan nilai dari hasil uji ADF yang lebih tinggi dari t-nilai statistik pada tingkatan 1%, 5% dan 10%. Selanjutnya 33 (tiga puluh tiga) variabel tersebut lnIKSS; lnIKSSO Level 1; lnIKSSO Level 2; dapat digunakan untuk mengestimasi kausalitas Granger dengan model koreksi kesalahan vektor (VECM).



Dari gambar diatas menunjukan bahwa semua variabel data indikator mendekati dengan *desire line* tujuan Perangkat Daerah yang berarti dari pengujian Heterokedastisitas untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model.



Dari gambar diatas menunjukan bahwa semua variabel data indikator berada dalam lingkaran pengamatan yang artinya variabel data yang diamati berada pada normalitas data dan tidak ada penyimpangan data.

Langkah berikutnya adalah pemilihan lag optimum yang tepat pada model kausalitas. Tabel berikut ini menunjukan hasil pengujian lag optimum. Hasil running test menunjukan bahwa penentuan panjang pada lag data yang akan digunakan dalam mengestimasi kausalitas Granger adalah lag dua untuk 33 (tiga puluh tiga) variabel data yang diuji.

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-419.1810	NA	162.6512	19.28095	19.48370*	19.35614*
1	-403.6441	26.83645	252.2089	19.71110	20.92759	20.16223
2	-360.2234	65.13107*	114.2664*	18.87379*	21.10403	19.70087
3	-341.1326	24.29740	168.5682	19.14239	22.38637	20.34541
4	-313.5341	28.85291	191.8342	19.02428	23.28200	20.60325

*indicate lag order selected by the criterion
 AIC : Akaike Information Criterion

Tabel diatas menunjukan bahwa nilai parameter Akaike Information Criterion (AIC) minimum berada pada lag kedua dengan nilai |18.87379|, hal ini mengisyaratkan lag optimum berada pada lag kedua.

Optimum Lag	$\Delta (lnIKSS)$	$\Delta (lnIKSS01)$	$\Delta (lnIKSS02)$	$\Delta (lnIKSS03)$	$\Delta (lnIKSS04)$	Joint
$\Delta Lag\ one$	2.561499	4.752189	1.749800	14.90229	2.404408	26.20479
	[0.7672]***	[0.4469]**	[0.8826]	[0.0108]***	[0.7908]	[0.3967]
$\Delta Lag\ two$	4.661034	1.807226	3.341873	2.993611	114.9873	157.2580
	[0.4586]	[0.8751]	[0.6474]**	[0.7010]	[0.0000]***	[0.0000]
df	5	5	5	5	5	25

Note: Chi-squared test statistic for lag exclusion
 Significant level ***1%, **5% and *10%
 Number in [] are p-values

Uji kointegrasi Johansen untuk mengetahui hubungan jangka pendek dan panjang antar variabel data yang diteliti. Dalam pengecekan kausalitas, analisis kausalitas Granger juga perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik dari hasil pengujian dengan memilih panjang lag optimal yang tepat. Kerangka kerja kointegrasi Johansen mengambil titik awalnya pada model koreksi kesalahan vektor (VECM). Berdasarkan hasil uji kointegrasi Johansen pada Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil nilai Trace Statistic lebih tinggi dari nilai kritis, begitu pula nilai Max-Eigen Statistic lebih tinggi dari nilai kritis. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka pendek dan panjang terdapat kointegrasi pada model persamaan hasil uji kointegrasi Johansen disajikan pada Tabel diatas.

Trace Test				
Null Hypothesized (H_0)	Eigenvalue	Trace Statistic	Critical Value 0.05	Prob**
None*	0.754118	128.4782	69.81889	0.0000
At most 1*	0.456632	65.34761	47.85613	0.0005
At most 2*	0.287481	37.89900	29.79707	0.0047
At most 3*	0.270480	22.64630	15.49471	0.0035
At most 4*	0.171288	8.454713	3.841465	0.0036

Maximum Eigenvalue Test				
Null Hypothesized (H ₀)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	Critical Value 0.05	Prob**
None*	0.754118	63.13059	33.87687	0.0000
At most 1	0.456632	27.44861	27.58434	0.0520
At most 2	0.287481	15.25269	21.13162	0.2716
At most 3	0.270480	14.19159	14.26460	0.0513
At most 4*	0.171288	8.454713	3.841465	0.0036

Dari persamaan (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) yang telah diformulasikan diawal, maka hasil pengujian test terhadap model vektor koreksi kesalahan (VECM) yang dihasilkan dengan persamaan baru :

$$\begin{aligned}
 D(lnIKSS,2) &= 0.357687854138 \cdot D(lnIKSS(-1),2) + 0.255696325482 \cdot D(lnIKSS01(-1),2) \\
 &+ 0.363554788223 \cdot D(lnIKSS02(-1),2) + 0.222569874236 \cdot D(lnIKSS03(-1),2) \\
 &+ 0.555889632566 \cdot D(lnIKSS04(-1),2) + 0.666889566336 \cdot D(lnIKSS05(-1),2) \\
 &+ 0.110225577956 \cdot D(lnIKSS06(-1),2) + 0.330000561142 \\
 &\cdot D(lnIKSS07(-1),2)
 \end{aligned}
 \tag{11}$$

$$\begin{aligned}
 D(lnIKSS01,2) &= 1.6134766894 \cdot D(lnIKSS08(-1),2) + 0.618968722732 \cdot D(lnIKSS09(-2),2) \\
 &+ 0.185263624107 \\
 &\cdot D(lnIKSS010(-1),2)
 \end{aligned}
 \tag{12}$$

$$\begin{aligned}
 D(lnIKSS02,2) &= 0.61326312845 \cdot D(lnIKSS011(-1),2) + 0.340396781481 \cdot D(lnIKSS012(-2),2) \\
 &+ 0.116692533601 \\
 &\cdot D(lnIKSS013(-1),2)
 \end{aligned}
 \tag{13}$$

$$\begin{aligned}
 D(lnIKSS03,2) &= 1.07193559441 \cdot D(lnIKSS014(-1),2) + 0.5599794065846 \\
 &\cdot D(lnIKSS015(-2),2) + 0.500636698415 \\
 &\cdot D(lnIKSS016(-1),2)
 \end{aligned}
 \tag{14}$$

$$\begin{aligned}
 D(lnIKSS04,2) &= 0.420313895269 \cdot D(lnIKSS017(-1),2) + 0.200233652213 \\
 &\cdot D(lnIKSS018(-1),2) + 0.339965221000 \\
 &\cdot D(lnIKSS019(-1),2)
 \end{aligned}
 \tag{15}$$

$$\begin{aligned}
 D(lnIKSS05,2) &= 0.604814176085 \cdot D(lnIKSS020(-1),2) + 0.66800500123622 \\
 &\cdot D(lnIKSS021(-1),2) + 0.558999622300 \\
 &\cdot D(lnIKSS022(-1),2)
 \end{aligned}
 \tag{16}$$

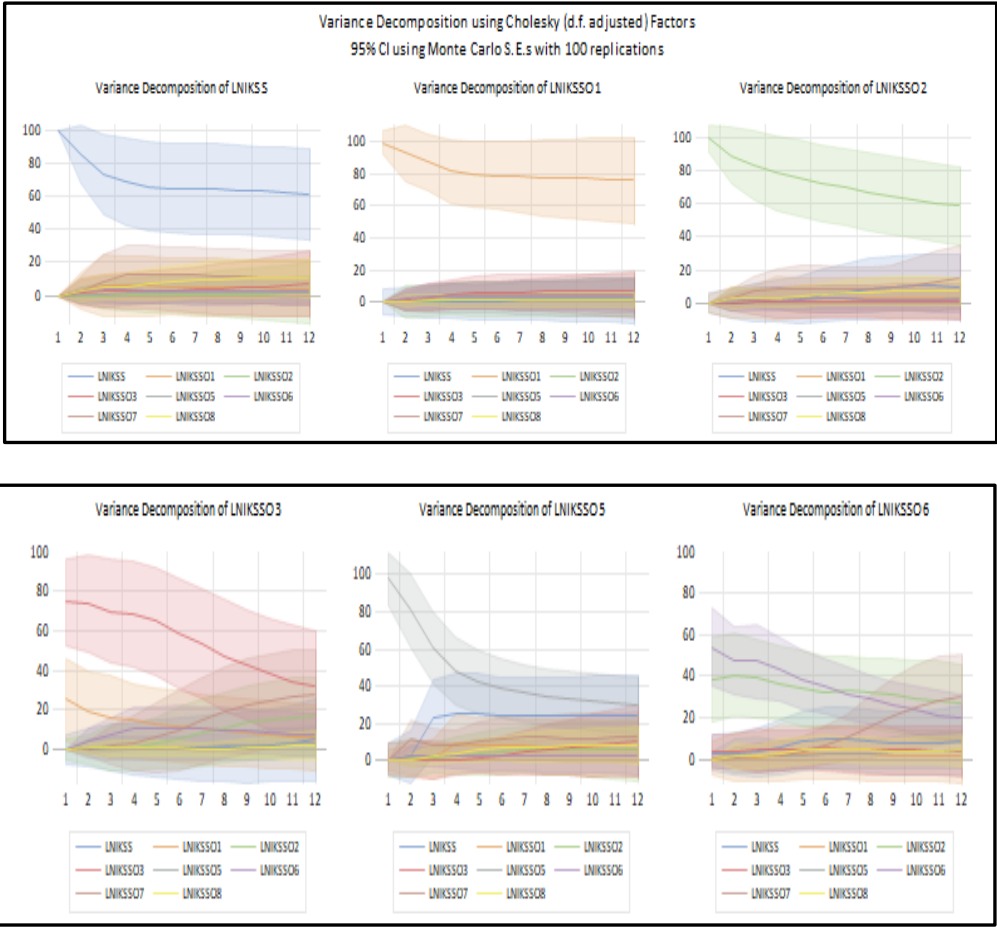
$$\begin{aligned}
 D(lnIKSS06,2) &= 0.460615311019 \cdot D(lnIKSS023(-1),2) + 0.004125563678 \\
 &\cdot D(lnIKSS024(-1),2) + 0.445012300622 \\
 &\cdot D(lnIKSS025(-1),2)
 \end{aligned}
 \tag{17}$$

$$\begin{aligned}
 D(lnIKSS07,2) &= 0.00731308357823 \cdot D(lnIKSS027(-1),2) + 0.008852003166 \\
 &\cdot D(lnIKSS027(-1),2)
 \end{aligned}
 \tag{18}$$

Model koreksi kesalahan vektor merupakan salah satu bentuk model vektor autoregresif (VAR) yang memperkirakan karena adanya bentuk data yang tidak stasioner namun terkointegrasi. VECM sering juga disebut sebagai desain VAR untuk rangkaian non stasioner yang mempunyai

hubungan kointegrasi. Spesifikasi VECM memulihkan hubungan jangka pendek dan panjang variabel endogen agar dapat bersatu dalam hubungan kointegrasi, namun tetap membiarkan adanya dinamika jangka pendek. Hasil estimasi model VEC dapat dilihat pada Tabel berikut.

Dependent Variabel	C	$\Delta (lnIKSS1_{t-1})$	$\Delta (lnIKSS2_{t-1})$	$\Delta (lnIKSS3_{t-1})$	$\Delta (lnIKSS4_{t-1})$	$\Delta (lnIKSS5_{t-1})$	ECT_{t-1}	Summary
$\Delta (lnIKSSO1)$	0.031 (0.249) [0.128]	0.357 (0.148) [-2.408]	0.087 (0.197) [0.445]	0.017 (0.201) [0.086]	0.097 (0.111) [0.878]	0.053 (0.078) [-0.685]	3.289	$R^2 : 0.8557$ Adj. $R^2 : 0.538$ F-stat : 5.661 AIC : 4.086 SC : 4.568
$\Delta (lnIKSSO2)$	0.027 (0.331) [-0.083]	1.059 (0.351) [3.010]	0.221 (0.467) [0.473]	0.479 (0.477) [1.003]	0.192 (0.263) [0.729]	1.613 (0.185) [-8.678]	2.131	$R^2 : 0.8663$ Adj. $R^2 : 0.342$ F-stat : 3.081 AIC : 4.654 SC : 5.136
$\Delta (lnIKSSO3)$	0.012 (0.338) [-0.038]	0.145 (0.114) [1.280]	0.029 (0.151) [-0.192]	0.613 (0.154) [-3.960]	0.080 (0.085) [-0.937]	0.185 (0.060) [-3.075]	0.561	$R^2 : 0.9063$ Adj. $R^2 : 0.312$ F-stat : 2.816 AIC : 4.698 SC : 5.179
$\Delta (lnIKSSO4)$	0.026 (0.186) [-0.141]	0.305 (0.208) [1.464]	0.433 (0.277) [-1.563]	0.137 (0.283) [-0.486]	1.071 (0.156) [-6.848]	0.089 (0.110) [0.810]	0.156	$R^2 : 0.8264$ Adj. $R^2 : 0.491$ F-stat : 4.862 AIC : 3.510 SC : 3.992
$\Delta (lnIKSSO5)$	0.045 (0.131) [0.345]	0.013 (0.149) [-0.089]	0.386 (0.199) [-1.944]	0.026 (0.203) [-0.131]	0.028 (0.112) [0.252]	0.046 (0.079) [-0.591]	8.656	$R^2 : 0.9380$ Adj. $R^2 : 0.911$ F-stat : 42.177 AIC : 2.810 SC : 3.291





6. Hasil

Setelah melakukan rangkaian beberapa uji variabel data Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) terhadap Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1 dan IKSSO Level 2 menunjukkan hasil sebagai berikut :

a. Persentase Kontribusi Peningkatan Kinerja

(1). IKSSO Level 1 Terhadap IKSS

	$\Delta (lnIKSS1)$	$\Delta (lnIKSS2)$	$\Delta (lnIKSS3)$	$\Delta (lnIKSS4)$	$\Delta (lnIKSS5)$	$\Delta (lnIKSS6)$
$\Delta (lnIKSSO1)$	24.17	29.33	31.01	28.76	30.52	26.42
$\Delta (lnIKSSO2)$	29.37	27.48	33.51	36.18	23.15	32.26
$\Delta (lnIKSSO3)$	27.45	32.53	30.14	26.24	29.83	24.63

$\Delta (lnIKSS04)$	27.46	28.22	31.27	32.16	31.64	33.16
$\Delta (lnIKSS05)$	26.19	31.08	24.26	28.28	23.58	24.35
$\Delta (lnIKSS06)$	32.45	33.19	28.65	31.12	29.76	32.36
$\Delta (lnIKSS07)$	26.00	32.82	28.62	35.18	22.45	29.41

(2). IKSSO Level 2 Terhadap IKSSO Level 1

	$\Delta (lnIKSS01)$	$\Delta (lnIKSS02)$	$\Delta (lnIKSS03)$	$\Delta (lnIKSS04)$	$\Delta (lnIKSS05)$	$\Delta (lnIKSS06)$	$\Delta (lnIKSS07)$
$\Delta (lnIKSS08)$	36.69	25.71	33.73	27.12	28.58	25.33	31.05
$\Delta (lnIKSS09)$	31.32	27.74	29.10	24.28	24.25	34.51	32.65
$\Delta (lnIKSS010)$	27.37	24.64	26.10	26.63	25.71	33.62	29.34
$\Delta (lnIKSS011)$	32.13	25.20	30.24	27.18	34.15	36.26	33.34
$\Delta (lnIKSS012)$	26.18	25.18	27.13	24.15	32.31	28.21	34.81
$\Delta (lnIKSS013)$	25.73	28.92	26.84	25.75	26.72	29.60	36.51
$\Delta (lnIKSS014)$	35.61	32.82	28.28	27.46	27.71	23.32	24.45
$\Delta (lnIKSS015)$	28.36	24.36	21.83	22.63	27.21	26.65	27.38
$\Delta (lnIKSS016)$	23.34	32.27	32.24	27.20	27.67	24.38	31.34
$\Delta (lnIKSS017)$	30.17	23.66	26.71	31.32	30.63	29.63	24.48
$\Delta (lnIKSS018)$	32.41	31.52	35.18	28.32	30.11	33.13	35.54
$\Delta (lnIKSS019)$	29.52	28.43	36.19	32.32	27.77	25.51	26.69
$\Delta (lnIKSS020)$	28.65	28.12	25.23	31.42	31.52	28.53	27.72
$\Delta (lnIKSS021)$	24.82	32.32	29.14	23.61	28.76	31.25	35.23
$\Delta (lnIKSS022)$	26.16	29.26	30.41	27.65	35.31	26.92	27.72
$\Delta (lnIKSS023)$	27.23	32.00	32.13	24.48	25.16	23.26	24.23
$\Delta (lnIKSS024)$	24.62	31.63	34.62	35.56	34.41	34.19	29.65
$\Delta (lnIKSS025)$	24.16	27.16	25.67	25.62	23.36	24.77	28.78
$\Delta (lnIKSS026)$	28.28	26.57	24.47	27.32	21.73	25.95	31.29
$\Delta (lnIKSS027)$	21.29	34.14	25.56	26.68	24.49	29.64	32.66

b. Persentase *Cross Cutting*

(1) IKSSO Level 1 Terhadap IKSS

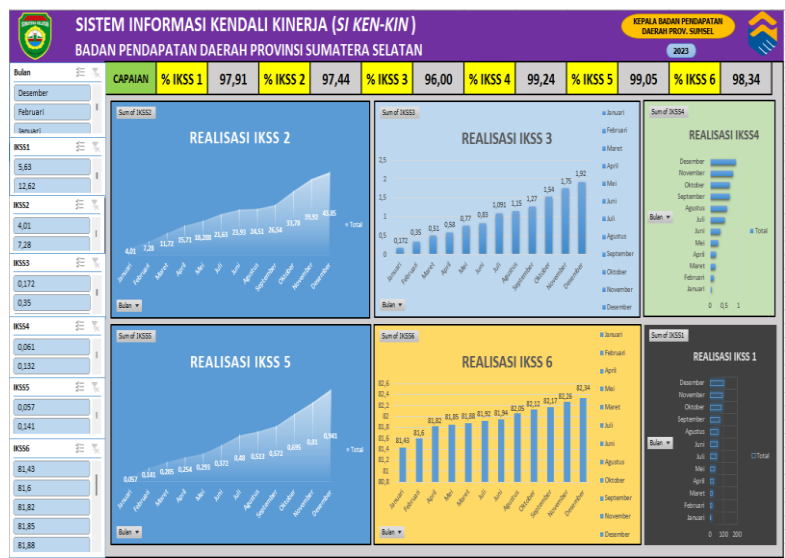
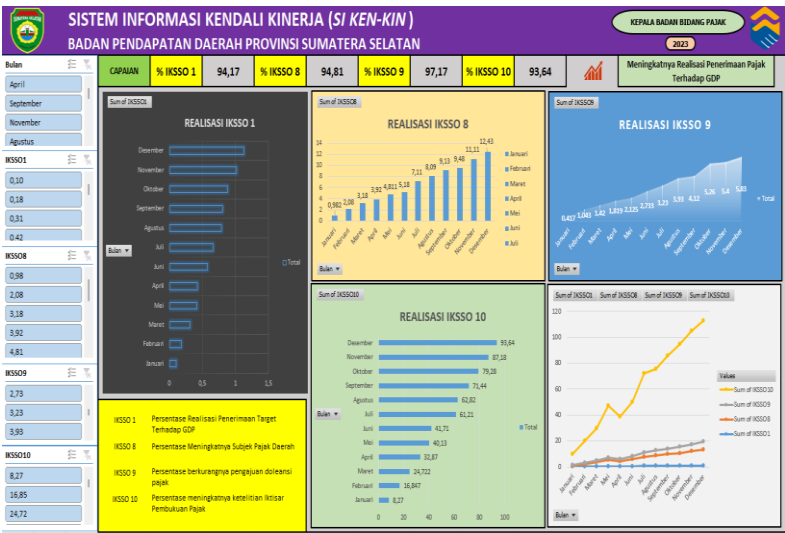
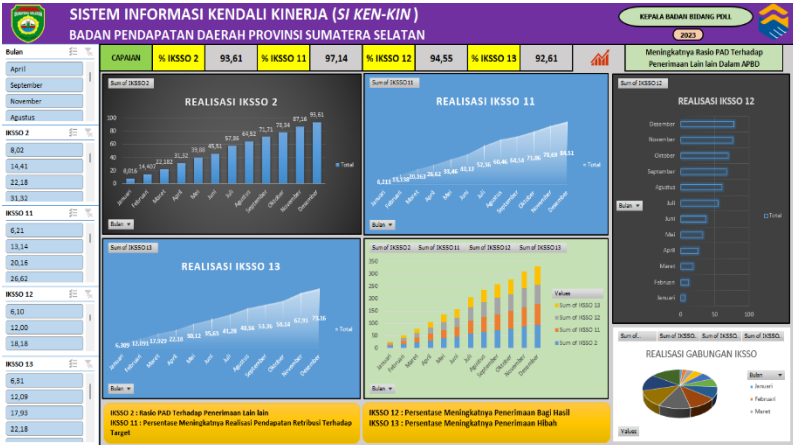
	$\Delta (lnIKSS1)$	$\Delta (lnIKSS2)$	$\Delta (lnIKSS3)$	$\Delta (lnIKSS4)$	$\Delta (lnIKSS5)$	$\Delta (lnIKSS6)$
$\Delta (lnIKSS01)$	11.63	19.27	21.73	12.44	18.25	18.27
$\Delta (lnIKSS02)$	14.28	14.17	16.37	14.74	13.25	15.43
$\Delta (lnIKSS03)$	16.18	16.18	13.34	14.74	17.27	16.82
$\Delta (lnIKSS04)$	13.24	12.27	14.21	14.13	15.14	14.16

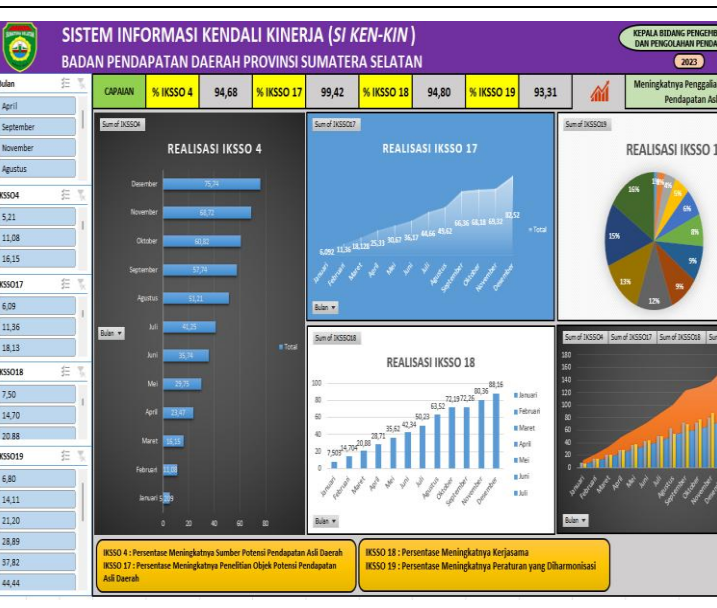
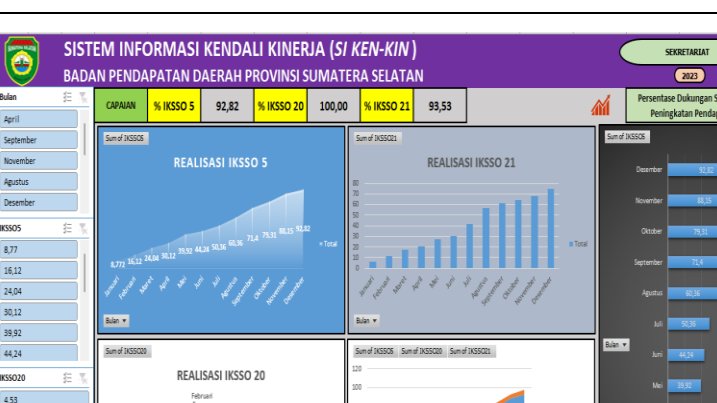
$\Delta (lnIKSS05)$	15.62	14.29	17.16	17.32	15.12	13.14
$\Delta (lnIKSS06)$	13.26	14.38	14.72	13.42	12.38	16.51
$\Delta (lnIKSS07)$	12.32	13.18	15.62	14.41	18.25	16.38

(2) IKSSO Level 2 Terhadap IKSSO Level 1

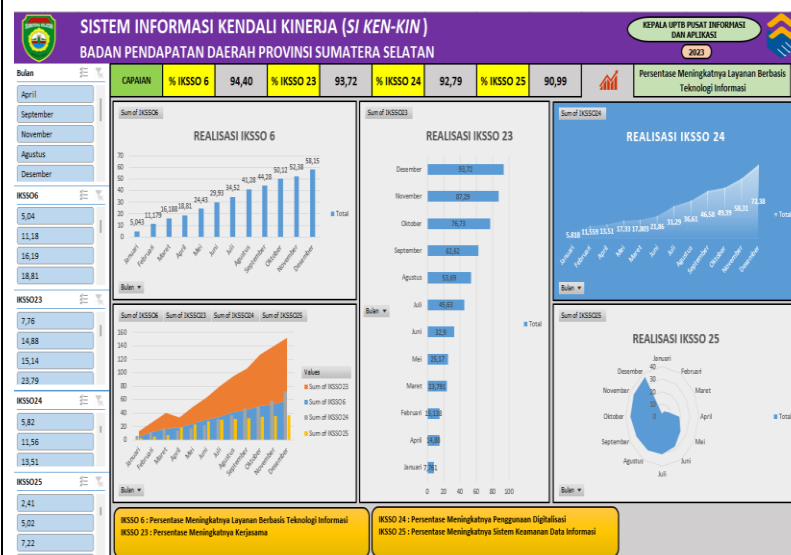
	$\Delta (lnIKSS01)$	$\Delta (lnIKSS02)$	$\Delta (lnIKSS03)$	$\Delta (lnIKSS04)$	$\Delta (lnIKSS05)$	$\Delta (lnIKSS06)$	$\Delta (lnIKSS07)$
$\Delta (lnIKSS08)$	23.71	30.18	32.15	32.52	31.26	27.18	28.35
$\Delta (lnIKSS09)$	28.26	32.13	23.24	25.87	32.62	23.48	27.81
$\Delta (lnIKSS010)$	32.34	31.72	32.42	33.24	30.32	25.26	29.16
$\Delta (lnIKSS011)$	23.24	24.71	32.32	23.29	26.38	25.16	32.31
$\Delta (lnIKSS012)$	24.26	24.26	32.18	32.62	28.45	27.40	26.40
$\Delta (lnIKSS013)$	24.51	25.42	26.14	24.12	22.47	26.13	45.23
$\Delta (lnIKSS014)$	24.14	27.28	26.14	30.14	32.62	24.66	25.42
$\Delta (lnIKSS015)$	29.24	25.54	33.72	31.38	32.61	33.25	32.62
$\Delta (lnIKSS016)$	36.17	33.15	27.67	32.21	27.23	24.32	28.26
$\Delta (lnIKSS017)$	30.87	26.64	35.25	34.24	32.23	29.23	34.51
$\Delta (lnIKSS018)$	20.52	31.43	24.65	32.74	24.32	32.45	33.15
$\Delta (lnIKSS019)$	31.24	32.87	23.32	26.61	23.28	26.82	25.65
$\Delta (lnIKSS020)$	32.65	31.28	34.64	28.54	28.58	31.41	30.27
$\Delta (lnIKSS021)$	25.18	26.94	30.82	26.14	31.28	28.45	24.74
$\Delta (lnIKSS022)$	23.35	29.67	31.35	32.42	34.65	31.01	28.62
$\Delta (lnIKSS023)$	32.17	32.16	32.23	28.26	24.53	26.74	25.80
$\Delta (lnIKSS024)$	34.65	33.37	25.36	26.15	26.65	24.21	30.34
$\Delta (lnIKSS025)$	25.15	34.45	34.20	26.24	32.21	25.28	31.22
$\Delta (lnIKSS026)$	31.78	31.42	27.24	31.18	33.59	32.72	28.61
$\Delta (lnIKSS027)$	28.72	26.64	26.62	23.13	24.55	26.33	27.41

7. Sistem Informasi Kendali Kinerja (SI KEN-KIN)

NO.	KENDALI KINERJA	SISTEM INFORMASI
1.	Kepala Badan	
2.	Bidang Pajak	
3.	Bidang PDLL	

4. Bidang Pengawasan dan Pembinaan	
5. Bidang P2PATDA	
6. Sekretariat	

7.	UPTB Puslia
----	-------------





3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahapan setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk menyatakan bahwa kinerja hari demi hari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemampuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja sulit bagi kita untuk menilai kinerja dari kebijakan/program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan tahun 2024 dan Penetapan Kinerja tahun 2024.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan perodesasi triwulan II (April – Mei – Juni) tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator sebagai berikut :

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon II Tahun 2025									TARGET AKHIR TAHUN 2025
			April			Mei			Juni			
1.	Meningkatnya Pendapatan Daerah		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah	23,72 %	21,43 %	90,34 %	27,38 %	25,44 %	92,91 %	38,56 %	34,63 %	89,80 %	91,97%
2.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi (Nilai absolut)	0,78	0,51	65,38 %	1,21	1,02	84,29 %	1,57	1,23	78,34 %	4,00
3.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,08	0,072	90,00 %	0,17	0,152	89,41 %	0,24	0,194	80,83 %	0,95
		Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	0,21	0,17	80,95 %	0,41	0,32	78,04 %	0,63	0,47	74,60 %	1,00

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Bidang Pajak Tahun 2025									TARGET AKHIR TAHUN 2025
			April			Mei			Juni			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Target Terhadap GDP	0,48 %	0,37 %	77,08 %	0,63 %	0,58 %	92,06 %	0,74 %	0,61 %	82,43 %	1,5 %
2.	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase meningkatnya Pendaftaran Objek Pajak Baru	4,52 %	4,12 %	91,15 %	5,82 %	5,23 %	89,86 %	6,84 %	6,14 %	89,76 %	14,26 %
3.	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	2,58	2,23 %	86,43 %	2,68 %	2,14 %	79,85 %	3,24 %	2,89 %	89,19 %	5,3 %
4.	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	30,07 %	27,13 %	90,22 %	43,14 %	39,26 %	91,00 %	50,28 %	47,17 %	93,81 %	100 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Bidang Pendapatan Lain – Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat Tahun 2025									TARGET AKHIR TAHUN 2025
			April			Mei			Juni			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	32,46 %	29,22 %	90,01 %	42,74 %	38,92 %	91,06 %	50,12 %	46,51 %	92,79 %	94,97 %
2.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	26,89 %	26,02 %	96,76 %	34,58 %	33,23 %	96,09 %	42,60 %	39,53 %	92,79 %	89,14 %
3.	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	6,72 %	6,13 %	91,22 %	12,68 %	12,14 %	95,74 %	17,41 %	16,78 %	96,38 %	83,48 %
4.	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	6,88 %	5,71 %	82,99 %	11,83 %	11,11 %	93,91 %	17,09 %	15,62 %	91,39 %	84,15 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Bidang Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2025									TARGET AKHIR TAHUN 2025
			April			Mei			Juni			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	3	3	100 %	3	3	100 %	3	3	100 %	Level 3
2.	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	33,14 %	31,23 %	94,23 %	41,41 %	39,62 %	95,67 %	49,56 %	45,26 %	91,32 %	92,46 %
3.	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	5,61 %	4,49 %	80,03 %	6,48 %	5,21 %	80,40 %	7,23 %	6,12 %	84,64 %	17,28 %
4.	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	4,89 %	3,75 %	76,68 %	5,26 %	4,51 %	85,74 %	5,17 %	4,22 %	81,62 %	13,02 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah Tahun 2025									TARGET AKHIR TAHUN 2025
			April			Mei			Juni			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Potensi Sumber Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	24,26 %	21,56 %	88,87 %	30,43 %	27,83 %	91,45 %	35,25 %	31,24 %	88,62 %	81,63 %
2.	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	28,42 %	24,52 %	86,27 %	32,62 %	29,15 %	89,36 %	36,28 %	33,18 %	91,45 %	83,48 %
3.	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	28,72 %	24,13 %	84,01 %	38,51 %	35,14 %	91,24 %	42,58 %	38,52 %	90,46 %	93,28 %
4.	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	27,83 %	23,62 %	84,87 %	38,91 %	34,52 %	88,71 %	44,52 %	42,12 %	94,60 %	100 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Sekretariat Tahun 2025									TARGET AKHIR TAHUN 2025
			April			Mei			Juni			
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	32,61 %	27,85 %	85,40 %	44,33 %	40,18 %	90,63 %	50,21 %	46,13 %	91,87 %	94,62 %
		Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	5,13 %	5,13 %	100 %	5,13 %	5,13 %	100 %	5,13 %	5,13 %	100 %	5,13 %
		Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	25,14 %	22,63 %	90,01 %	31,56 %	28,91 %	91,60 %	37,03 %	33,26 %	89,81 %	80,61 %



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi Tahun 2025									TARGET AKHIR TAHUN 2025
			April			Mei			Juni			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	21,23 %	18,19 %	85,68 %	27,07 %	24,46 %	90,35 %	33,74 %	26,76 %	79,31 %	62,04 %
2.	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama	18,53 %	15,25 %	82,29 %	27,28 %	24,63 %	90,28 %	35,61 %	30,06 %	84,41 %	91,12 %
3.	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	15,68 %	12,48 %	79,59 %	19,85 %	17,15 %	86,39 %	23,36 %	19,42 %	83,13 %	78,82 %
4.	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	20,13 %	17,51 %	86,98 %	27,73 %	24,02 %	86,62 %	30,18 %	27,51 %	91,15 %	41,23
5.	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	100 Mbps	100 MBPs	100 %	100 MBPs	100 MBPs	100 %	100 MBPs	100 MBPs	100 %	100 MBPs

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025									TARGET AKHIR TAHUN 2025
			April			Mei			Juni			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Pajak Kesamsatan	19,24 %	14,28 %	74,22 %	24,51 %	20,78 %	84,78 %	36,71 %	35,62 %	97,03 %	100 %
2.	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	3,41 %	3,12 %	91,49 %	3,92 %	3,62 %	92,34 %	4,28 %	3,17 %	74,06 %	9,13 %
3.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	2,81 %	2,62 %	93,23 %	3,74 %	3,36 %	89,83 %	4,15 %	3,45 %	83,13 %	9,81 %

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahunan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon II Tahun 2025									TARGET AKHIR TAHUN 2025
			April			Mei			Juni			
1.	Meningkatnya Pendapatan Daerah		Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	
		Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah	23,72 %	21,43 %	23,30 %	27,38 %	25,44 %	27,66 %	38,56 %	34,63 %	37,65 %	91,97%
2.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi (Nilai absolut)	0,78	0,51	12,75 %	1,21	1,02	25,5 %	1,57	1,23	30,75 %	4,00
3.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,08	0,072	7,57 %	0,17	0,152	16,00 %	0,24	0,194	20,42 %	0,95
		Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	0,21	0,17	17,00 %	0,41	0,32	32,00 %	0,63	0,47	47,00 %	1,00

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Bidang Pajak Tahun 2025									TARGET AKHIR TAHUN 2025
			April			Mei			Juni			
			Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	
1.	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Target Terhadap GDP	0,48 %	0,37 %	24,67 %	0,63 %	0,58 %	38,67 %	0,74 %	0,61 %	40,67 %	1,5 %
2.	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase meningkatnya Pendaftaran Objek Pajak Baru	4,52 %	4,12 %	28,89 %	5,82 %	5,23 %	36,67 %	6,84 %	6,14 %	43,05 %	14,26 %
3.	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	2,58	2,23 %	42,07 %	2,68 %	2,14 %	40,37 %	3,24 %	2,89 %	54,52 %	5,3 %
4.	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	30,07 %	27,13 %	27,13 %	43,14 %	39,26 %	39,26 %	50,28 %	47,17 %	47,17 %	100 %



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Bidang Pendapatan Lain – Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat Tahun 2025									TARGET AKHIR TAHUN 2025
			April			Mei			Juni			
			Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	
1.	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	32,46 %	29,22 %	30,76 %	42,74 %	38,92 %	40,98 %	50,12 %	46,51 %	48,97 %	94,97 %
2.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	26,89 %	6,02 %	6,75 %	34,58 %	13,23 %	14,84 %	42,60 %	19,53 %	21,91 %	89,14 %
3.	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	6,72 %	6,13 %	7,34 %	12,68 %	12,14 %	14,54 %	17,41 %	16,78 %	20,10 %	83,48 %
4.	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	6,88 %	5,71 %	6,78 %	11,83 %	11,11 %	31,20 %	17,09 %	15,62 %	18,56 %	84,15 %



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Bidang Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2025									TARGET AKHIR TAHUN 2025
			April			Mei			Juni			
			Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	
1.	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	3	3	100 %	3	3	100 %	3	3	100 %	Level 3
2.	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	33,14 %	31,23 %	33,77 %	41,41 %	39,62 %	42,85 %	49,56 %	45,26 %	48,95 %	92,46 %
3.	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	5,61 %	4,49 %	25,98 %	6,48 %	5,21 %	30,15 %	7,23 %	6,12 %	35,41 %	17,28 %
4.	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	4,89 %	3,75 %	28,80 %	5,26 %	4,51 %	34,63 %	5,17 %	4,22 %	32,41 %	13,02 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah Tahun 2025									TARGET AKHIR TAHUN 2025
			April			Mei			Juni			
			Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	
1.	Meningkatnya Potensi Sumber Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	24,26 %	21,56 %	26,41 %	30,43 %	27,83 %	34,09 %	35,25 %	31,24 %	38,27 %	81,63 %
2.	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	28,42 %	24,52 %	29,37 %	32,62 %	29,15 %	34,91 %	36,28 %	33,18 %	39,74 %	83,48 %
3.	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	28,72 %	24,13 %	25,86 %	38,51 %	35,14 %	37,67 %	42,58 %	38,52 %	41,29 %	93,28 %
4.	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	27,83 %	23,62 %	23,62 %	38,91 %	34,52 %	34,52 %	44,52 %	42,12 %	42,12 %	100 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Sekretariat Tahun 2025									TARGET AKHIR TAHUN 2025
			April			Mei			Juni			
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah		Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	
		Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	32,61 %	27,85 %	29,43 %	44,33 %	40,18 %	42,46 %	50,21 %	46,13 %	48,75 %	94,62 %
		Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	5,13 %	5,13 %	100 %	5,13 %	5,13 %	100 %	5,13 %	5,13 %	100 %	5,13 %
		Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	25,14 %	22,63 %	28,07 %	31,56 %	28,91 %	35,86 %	37,03 %	33,26 %	41,26 %	80,61 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi Tahun 2025									TARGET AKHIR TAHUN 2025
			April			Mei			Juni			
			Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	
1.	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	21,23 %	18,19 %	29,31 %	27,07 %	24,46 %	39,42 %	33,74 %	26,76 %	43,13 %	62,04 %
2.	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama	18,53 %	15,25 %	16,73 %	27,28 %	24,63 %	27,03 %	35,61 %	30,06 %	32,98 %	91,12 %
3.	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	15,68 %	12,48 %	15,83 %	19,85 %	17,15 %	21,75 %	23,36 %	19,42 %	24,63 %	78,82 %
4.	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	20,13 %	17,51 %	42,46 %	27,73 %	24,02 %	58,25 %	30,18 %	27,51 %	66,72 %	41,23
5.	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	100 Mbps	100 MBPs	100 %	100 MBPs	100 MBPs	100 %	100 MBPs	100 MBPs	100 %	100 MBPs

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025									TARGET AKHIR TAHUN 2025
			April			Mei			Juni			
			Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Tahunan	
1.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Pajak Kesamsatan	19,24 %	14,28 %	14,28 %	24,51 %	20,78 %	20,78 %	36,71 %	35,62 %	35,62 %	100 %
2.	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	3,41 %	3,12 %	34,17 %	3,92 %	3,62 %	39,64 %	4,28 %	3,17 %	34,72 %	9,13 %
3.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	2,81 %	2,62 %	26,70 %	3,74 %	3,36 %	34,25 %	4,15 %	3,45 %	35,16 %	9,81 %



3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Yang Tertuang Dalam RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon II Tahun 2025									TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH
			April			Mei			Juni			
1.	Meningkatnya Pendapatan Daerah		Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	
		Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah	23,72 %	21,43 %	23,24 %	27,38 %	25,44 %	27,58 %	38,56 %	34,63 %	37,55 %	92,21 %
2.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi (Nilai absolut)	0,78	0,51	8,5 %	1,21	1,02	17,00 %	1,57	1,23	20,5 %	6,00
3.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,08	0,072	7,34 %	0,17	0,152	15,51 %	0,24	0,194	19,79 %	0,98
		Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	0,21	0,17	14,40 %	0,41	0,32	27,11 %	0,63	0,47	39,83 %	1,18

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Bidang Pajak Tahun 2025									TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH
			April			Mei			Juni			
			Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	
1.	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Target Terhadap GDP	0,48 %	0,37 %	21,38 %	0,63 %	0,58 %	33,52 %	0,74 %	0,61 %	35,26 %	1,73 %
2.	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase meningkatnya Pendaftaran Objek Pajak Baru	4,52 %	4,12 %	27,81 %	5,82 %	5,23 %	35,31 %	6,84 %	6,14 %	41,45 %	14,81 %
3.	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	2,58	2,23 %	44,42 %	2,68 %	2,14 %	42,62 %	3,24 %	2,89 %	57,56 %	5,02 %
4.	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	30,07 %	27,13 %	27,13 %	43,14 %	39,26 %	39,26 %	50,28 %	47,17 %	47,17 %	100 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Bidang Pendapatan Lain – Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat Tahun 2025									TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH
			April			Mei			Juni			
			Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	
1.	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	32,46 %	29,22 %	30,61 %	42,74 %	38,92 %	40,78 %	50,12 %	46,51 %	48,73 %	95,43 %
2.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	26,89 %	6,02 %	6,70 %	34,58 %	13,23 %	14,73 %	42,60 %	19,53 %	21,75 %	89,78 %
3.	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	6,72 %	6,13 %	7,30 %	12,68 %	12,14 %	14,46 %	17,41 %	16,78 %	19,99 %	83,93 %
4.	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	6,88 %	5,71 %	6,73 %	11,83 %	11,11 %	13,09 %	17,09 %	15,62 %	18,41 %	84,83 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Bidang Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2025									TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH
			April			Mei			Juni			
			Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	
1.	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	3	3	100 %	3	3	100 %	3	3	100 %	Level 3
2.	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	33,14 %	31,23 %	33,61 %	41,41 %	39,62 %	42,64 %	49,56 %	45,26 %	48,71 %	92,91 %
3.	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	5,61 %	4,49 %	26,64 %	6,48 %	5,21 %	30,91 %	7,23 %	6,12 %	36,32 %	16,85 %
4.	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	4,89 %	3,75 %	29,43 %	5,26 %	4,51 %	35,40 %	5,17 %	4,22 %	33,12 %	12,74 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah Tahun 2025									TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH
			April			Mei			Juni			
			Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	
1.	Meningkatnya Potensi Sumber Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	24,26 %	21,56 %	26,23 %	30,43 %	27,83 %	33,86 %	35,25 %	31,24 %	38,00 %	82,19 %
2.	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	28,42 %	24,52 %	29,32 %	32,62 %	29,15 %	34,86 %	36,28 %	33,18 %	39,68 %	83,61 %
3.	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	28,72 %	24,13 %	25,77 %	38,51 %	35,14 %	37,53 %	42,58 %	38,52 %	41,14 %	93,62 %
4.	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	27,83 %	23,62 %	23,62 %	38,91 %	34,52 %	34,52 %	44,52 %	42,12 %	42,12 %	100 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Sekretariat Tahun 2025									TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH
			April			Mei			Juni			
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah		Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	
		Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	32,61 %	27,85 %	29,32 %	44,33 %	40,18 %	42,31 %	50,21 %	46,13 %	48,57 %	94,96 %
		Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	5,13 %	5,13 %	104,26 %	5,13 %	5,13 %	104,26 %	5,13 %	5,13 %	104,26 %	4,92 %
		Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	25,14 %	22,63 %	27,96 %	31,56 %	28,91 %	35,72 %	37,03 %	33,26 %	41,10 %	80,92 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi Tahun 2025									TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH
			April			Mei			Juni			
			Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	
1.	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	21,23 %	18,19 %	46,76 %	27,07 %	24,46 %	39,02 %	33,74 %	26,76 %	42,69 %	62,67 %
2.	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama	18,53 %	15,25 %	16,65 %	27,28 %	24,63 %	26,90 %	35,61 %	30,06 %	32,83 %	91,54 %
3.	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	15,68 %	12,48 %	15,75 %	19,85 %	17,15 %	21,65 %	23,36 %	19,42 %	24,51 %	79,21 %
4.	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	20,13 %	17,51 %	41,91 %	27,73 %	24,02 %	57,49 %	30,18 %	27,51 %	65,84 %	41,78
5.	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	100 Mbps	100 MBPs	100 %	100 MBPs	100 MBPs	100 %	100 MBPs	100 MBPs	100 %	100 MBPs

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025									TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH
			April			Mei			Juni			
			Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Jangka Menengah	
1.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Pajak Kesamsatan	19,24 %	14,28 %	14,28 %	24,51 %	20,78 %	20,78 %	36,71 %	35,62 %	35,62 %	100 %
2.	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	3,41 %	3,12 %	36,19 %	3,92 %	3,62 %	41,99 %	4,28 %	3,17 %	36,77 %	8,62 %
3.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	2,81 %	2,62 %	27,29 %	3,74 %	3,36 %	35,00 %	4,15 %	3,45 %	35,93 %	9,60 %

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Tahun Sebelumnya Dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon II Tahun 2025									TARGET AKHIR TAHUN 2025
			April			Mei			Juni			
1.	Meningkatnya Pendapatan Daerah		Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	
		Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah	23,71 %	21,43 %	90,38 %	32,62 %	25,44 %	77,98 %	52,01 %	34,63 %	66,58 %	91,97%
2.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi (Nilai absolut)	0,58	0,51	87,93 %	0,77	1,02	132,46 %	0,94	1,23	130,85 %	4,00
3.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,203	0,072	35,46 %	0,291	0,152	52,23 %	0,373	0,194	52,01 %	0,95
		Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	0,254	0,17	66,92 %	0,293	0,32	109,21 %	0,372	0,47	126,34 %	1,00

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Bidang Pajak Tahun 2025									TARGET AKHIR TAHUN 2025
			April			Mei			Juni			
			Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	
1.	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Target Terhadap GDP	0,421 %	0,37 %	87,88 %	0,415 %	0,58 %	139,75 %	0,576 %	0,61 %	105,90 %	1,5 %
2.	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase meningkatnya Pendaftaran Objek Pajak Baru	3,923 %	4,12 %	105,02 %	4,811 %	5,23 %	108,71 %	5,18 %	6,14 %	118,53 %	14,26 %
3.	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	1,819	2,23 %	122,59 %	2,125 %	2,14 %	100,70 %	2,733 %	2,89 %	105,74 %	5,3 %
4.	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	32,87 %	27,13 %	82,53 %	40,13 %	39,26 %	97,83 %	47,71 %	47,17 %	98,86 %	100 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Bidang Pendapatan Lain – Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat Tahun 2025									TARGET AKHIR TAHUN 2025
			April			Mei			Juni			
			Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	
1.	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	31,32 %	29,22 %	93,29 %	39,88 %	38,92 %	97,59 %	45,51 %	46,51 %	102,19 %	94,97 %
2.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	26,62 %	26,02 %	97,74 %	33,46 %	33,23 %	99,31 %	40,12 %	39,53 %	98,52 %	89,14 %
3.	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	6,72 %	6,13 %	91,22 %	12,68 %	12,14 %	95,74 %	17,41 %	16,78 %	96,38 %	83,48 %
4.	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	6,88 %	5,71 %	82,99 %	11,83 %	11,11 %	93,91 %	17,09 %	15,62 %	91,39 %	84,15 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Bidang Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2025									TARGET AKHIR TAHUN 2025
			April			Mei			Juni			
			Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	
1.	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	3	3	100 %	3	3	100 %	3	3	100 %	Level 3
2.	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	30,77 %	31,23 %	101,49 %	38,81 %	39,62 %	102,08 %	47,07 %	45,26 %	96,15 %	92,46 %
3.	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	5,125 %	4,49 %	87,60 %	5,89 %	5,21 %	88,45 %	7,99 %	6,12 %	76,59 %	17,28 %
4.	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	4,11 %	3,75 %	91,24 %	5,02 %	4,51 %	89,84 %	6,19 %	4,22 %	68,17 %	13,02 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah Tahun 2025									TARGET AKHIR TAHUN 2025
			April			Mei			Juni			
			Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	
1.	Meningkatnya Potensi Sumber Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	23,47 %	21,56 %	91,86 %	29,75 %	27,83 %	93,54 %	35,78 %	31,24 %	87,31 %	81,63 %
2.	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	25,33 %	24,52 %	96,80 %	30,67 %	29,15 %	95,04 %	36,17 %	33,18 %	91,73 %	83,48 %
3.	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	28,71 %	24,13 %	84,04 %	35,62 %	35,14 %	98,65 %	42,34 %	38,52 %	90,97 %	93,28 %
4.	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	28,89 %	23,62 %	81,75 %	37,82 %	34,52 %	91,27 %	44,44 %	42,12 %	94,77 %	100 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff Sekretariat Tahun 2025									TARGET AKHIR TAHUN 2025
			April			Mei			Juni			
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah		Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	
		Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	30,12 %	27,85 %	92,46 %	39,92 %	40,18 %	100,65 %	44,24 %	46,13 %	104,27 %	94,62 %
		Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	4,53 %	5,13 %	113,24 %	4,53 %	5,13 %	113,24 %	4,53 %	5,13 %	113,24 %	5,13 %
		Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	20,21 %	22,63 %	111,97 %	27,27 %	28,91 %	106,01 %	30,16 %	33,26 %	110,27 %	80,61 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi Tahun 2025									TARGET AKHIR TAHUN 2025
			April			Mei			Juni			
			Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	
1.	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	18,81 %	18,19 %	96,70 %	24,43 %	24,46 %	100,12 %	29,93 %	26,76 %	89,40 %	62,04 %
2.	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama	14,88 %	15,25 %	102,48 %	25,17 %	24,63 %	97,85 %	32,90 %	30,06 %	91,36 %	91,12 %
3.	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	13,51 %	12,48 %	92,37 %	17,33 %	17,15 %	98,96 %	21,86 %	19,42 %	88,83 %	78,82 %
4.	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	18,82 %	17,51 %	93,03 %	23,43 %	24,02 %	102,51 %	27,87 %	27,51 %	98,70 %	41,23
5.	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	100 Mbps	100 MBPs	100 %	100 MBPs	100 MBPs	100 %	100 MBPs	100 MBPs	100 %	100 MBPs



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja Unit Eselon III, IV dan Operasional Staff UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025									TARGET AKHIR TAHUN 2025
			April			Mei			Juni			
			Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian	
1.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Pajak Kesamsatan	21,33 %	14,28 %	66,94 %	27,88 %	20,78 %	74,53 %	42,14 %	35,62 %	84,52 %	100 %
2.	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	3,17 %	3,12 %	98,42 %	4,13 %	3,62 %	87,65 %	4,32 %	3,17 %	73,37 %	9,13 %
3.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	2,738 %	2,62 %	95,69 %	3,17 %	3,36 %	105,99 %	4,09 %	3,45 %	84,35 %	9,81 %

3.1.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

Unit Kerja Eselon II

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah		38,56	34,63	89,90	Kolaborasi dengan pihak kepolisian dan jasa raharja dalam meningkatkan pendapatan PKB dan BBN-KB	
2.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi (Nilai absolut)		1,57	1,23	78,34	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) dengan melakukan pelayanan <i>door to door service</i>	
4.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	1.	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,24	0,194	80,83	Pembentukan satuan tugas PBB KB Perairan, kolaborasi dengan Lanal, KSOP, Disnav, Dishub	
		2.	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	0,63	0,47	74,60	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah	

Unit Kerja Eselon III Bidang Pajak

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Target Terhadap GDP	0,74	0,61	82,43	Perpanjangan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penambahan kuato akses data kependudukan	
2.	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase meningkatnya Pendaftaran Objek Pajak Baru	6,84	6,14	89,76	Kerjasama dengan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) se Sumatera Selatan	
3.	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	3,24	2,89	89,19	Melaksanakan bimbingan teknis pegawai mengenai perhitungan pajak	
4.	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	50,28	47,17	93,81	Melaksanakan rekonsiliasi pembukuan pajak daerah	

Unit Kerja Eselon III Bidang Pendapatan Lain – Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	50,12	46,51	92,79	Koordinasi dan kolaborasi peningkatan objek retribusi bersama OPD terkait	
2.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	42,60	39,53	92,79	Melakukan pemantauan ke lapangan bersama OPD pengampu retribusi	
3.	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	17,41	16,78	96,38	Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat terkait lifting Migas	
4.	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	17,09	15,62	91,39	Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga termasuk BUMD terkait peningkatan bagi hasil deviden	

Unit Kerja Eselon III Bidang Pengawasan dan Pembinaan

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	3	3	100	Meningkatkan kapasitas Pegawai terkait pengendalian intern pemerintah	
2.	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	49,56	45,26	91,32	Melaksanakan pemeriksaan secara intensif secara berkala waktu	
3.	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	7,23	6,12	84,64	Melaksanakan aksi terhadap pengelolaan manajemen risiko	
4.	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	5,17	4,22	81,62	Koordinasi dan konsultasi terkait dengan temuan pihak eskternal	

Unit Kerja Eselon III Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Potensi Sumber Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	35,25	31,24	88,62	Melakukan identifikasi potensi sumber pendapatan daerah	
2.	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	36,28	33,18	91,45	Melaksanakan MoU dengan pihak akademisi terkait dengan objek penelitian PAD	
3.	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	42,58	38,52	90,46	Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan PAD	
4.	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	44,52	42,12	94,60	Harmonisasi berbagai peraturan terkait pelaksanaan UU 1/2022 tentang HKPD	

Unit Kerja Eselon III Sekretariat

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	50,21	46,13	91,87	Melakukan verifikasi dan penatausahaan keuangan	
		Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	5,13	5,13	100,00	Melakukan evaluasi kinerja secara berkala waktu	
		Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	37,03	33,26	89,81	Melaksanakan bimbingan teknis pegawai	

Unit Kerja Eselon III UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	33,74	26,76	79,31	Melaksanakan pengembangan aplikasi pembayaran pajak daerah	
2.	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama	35,61	30,06	84,41	Memperluas kerjasama layanan pada e commerce	
3.	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	23,36	19,42	83,13	Melaksanakan sosialisasi secara massif ke masyarakat	
4.	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	30,18	27,51	91,15	Kerjasama dengan BP Batam terkait pengamanan data	
5.	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	100 MBPs	100 MBPs	100,00	Meningkatkan kinerja anggaran terkait internet untuk pelayanan pembayaran pajak	

Unit Kerja Eselon III UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Pajak Kesamsatan	36,71	35,62	97,03	Kerjasama dengan pihak kepolisian dan jasa raharja	
2.	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	4,28	3,17	74,06	Melaksanakan operasi gabungan terkait dengan tunggakan pajak daerah	
3.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	4,15	3,45	83,13	Koordinasi dan konsultasi secara intensif	

3.1.6 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program Kegiatan Sub Kegiatan

NO .	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA		% CAPAIAN TW II	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN TW II	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah		89,80	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	28,36	Menunjang
					Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan	15,41	Menunjang
2.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi (Nilai absolut)		78,34	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan keuangan	28,40	Menunjang
					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	22,95	Menunjang
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	7,09	Menunjang
3.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	1.	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	80,83	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	3,66	Menunjang
		2.	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	74,60	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	7,09	Menunjang
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang perkantoran	38,42	Menunjang
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Dana Transfer	16,27	Menunjang
					Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	16,27	Menunjang
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	7,09	Menunjang
					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	7,09	Menunjang
					Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3,41	Menunjang
					Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	3,66	Menunjang

				Daerah			
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8,28	Menunjang
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	0,00	Menunjang
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12,57	Menunjang
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	0,52	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	0,00	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	18,40	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	10,03	Menunjang
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	0,00	Menunjang
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang telah ditindaklanjuti	0,00	Menunjang
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	0,00	Menunjang
				Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	0,00	Menunjang
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	12,84	Menunjang

3.1.7 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		260.005.853.397,00	73.748.268.075,00	28,36
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	800.000.000,00	123.247.989,00	15,41
	1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000.000,00	63.487.180,00	21,16
	1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	200.000.000,00	27.114.654,00	13,56
	1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000.000,00	32.646.155,00	10,88
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	190.356.302.829,00	54.067.228.188,00	28,40
	2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	189.812.802.829,00	53.996.637.543,00	28,45
	2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	243.500.000,00	0,00	0,00
	2.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	300.000.000,00	70.590.645,00	23,53
	3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.000.000,00	0,00	0,00
	3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.000.000,00	0,00	0,00
	4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	368.766.000,00	84.626.250,00	22,95
	4.1	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	121.266.000,00	0,00	0,00
	4.2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	60.000.000,00	32.816.700,00	54,69
	4.3	Pengolahan Data Retribusi Daerah	144.500.000,00	42.809.550,00	29,63
	4.4	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	43.000.000,00	9.000.000,00	20,93
	5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.864.000.000,00	28.300.000,00	1,52
	5.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	52.000.000,00	0,00	0,00
	5.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	774.000.000,00	28.300.000,00	3,66
	5.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	888.000.000,00	0,00	0,00
	5.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000,00	0,00	0,00
	6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.287.150.320,00	4.913.986.565,00	18,01
	6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	833.172.720,00	360.265.720,00	43,24
	6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.099.750.000,00	99.750.000,00	9,07
	6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	750.000.000,00	0,00	0,00
	6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.584.374.600,00	1.278.294.300,00	49,46
	6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.550.000.000,00	2.301.646.755,00	41,47
	6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	15.120.000,00	30,24
	6.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	202.000.000,00	28.738.950,00	14,23
	6.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.202.000.000,00	229.103.638,00	19,06
	6.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15.015.853.000,00	601.067.202,00	4,00
	7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.377.151.963,00	5.205.303.450,00	50,16
	7.1	Pengadaan Mebel	1.000.000.000,00	999.976.382,00	100,00
	7.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.611.500.000,00	861.500.000,00	53,46
	7.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.765.651.963,00	3.343.827.068,00	43,06



	8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.902.200.000,00	8.415.768.274,00	38,42
	8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	92.000.000,00	12.941.000,00	14,07
	8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.127.000.000,00	1.089.495.088,00	51,22
	8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	182.000.000,00	43.650.000,00	23,98
	8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.501.200.000,00	7.269.682.186,00	37,28
	9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.022.282.285,00	909.807.359,00	12,96
	9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.150.000.000,00	181.244.166,00	8,43
	9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.939.635.180,00	395.190.588,00	13,44
	9.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	483.304.945,00	188.954.945,00	39,10
	9.4	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	200.000.000,00	0,00	0,00
	9.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.249.342.160,00	144.417.660,00	11,56
II.		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	220.000.000,00	35.791.238,00	16,27
	1.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	220.000.000,00	35.791.238,00	16,27
	1.1	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	220.000.000,00	35.791.238,00	16,27
III.		Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah	7.124.185.800,00	504.973.565,00	7,09
	1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.124.185.800,00	504.973.565,00	7,09
	1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	637.400.000,00	21.750.000,00	3,41
	1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	487.572.000,00	17.843.800,00	3,66
	1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2.000.000.000,00	165.657.243,00	8,28
	1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	160.802.000,00	0,00	0,00
	1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	550.000.000,00	69.140.044,00	12,57
	1.6	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	734.392.000,00	3.850.000,00	0,52
	1.7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	100.000.000,00	0,00	0,00
	1.8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.074.821.800,00	197.747.800,00	18,40
	1.9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	100.000.000,00	10.033.378,00	10,03
	1.10	Penagihan Pajak Daerah	789.198.000,00	0,00	0,00
	1.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00
	1.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	200.000.000,00	980.000,00	0,49
	1.13	Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100.000.000,00	0,00	0,00
	1.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	140.000.000,00	0,00	0,00
		JUMLAH	267.350.039.197,00	74.289.032.878,00	27,79

3.1.8 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

N O.	INDIKAT OR SASARA N STRATEG IS	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI TRIWULAN II [Rp.]	% CAPAIA N TRIWUL AN II	TINGKA T EFISIE NSI
		TARG ET TW II	REALIS ASI TW II	% CAPAI AN TW II				
1.	Persenta se Realisasi Pencapai an Pendapat an Asli Daerah	38,56	34,63	89,80	260.005.853.397,00	73.748.268.075,00	28,36	
					800.000.000,00	123.247.989,00	15,41	
					300.000.000,00	63.487.180,00	21,16	
					200.000.000,00	27.114.654,00	13,56	
					300.000.000,00	32.646.155,00	10,88	
					190.356.302.829,00	54.067.228.188,00	28,40	
					189.812.802.829,00	53.996.637.543,00	28,45	
					243.500.000,00	0,00	0,00	
					300.000.000,00	70.590.645,00	23,53	
					28.000.000,00	0,00	0,00	
					28.000.000,00	0,00	0,00	
2.	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi (Nilai absolut)	1,57	1,23	78,34	368.766.000,00	84.626.250,00	22,95	
					121.266.000,00	0,00	0,00	
					60.000.000,00	32.816.700,00	54,69	
					144.500.000,00	42.809.550,00	29,63	
					43.000.000,00	9.000.000,00	20,93	
					1.864.000.000,00	28.300.000,00	1,52	
					52.000.000,00	0,00	0,00	
					774.000.000,00	28.300.000,00	3,66	
					888.000.000,00	0,00	0,00	
					150.000.000,00	0,00	0,00	
3.	Persenta se Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,24	0,194	80,83	27.287.150.320,00	4.913.986.565,00	18,01	
					833.172.720,00	360.265.720,00	43,24	
					1.099.750.000,00	99.750.000,00	9,07	
					750.000.000,00	0,00	0,00	
					2.584.374.600,00	1.278.294.300,00	49,46	
					5.550.000.000,00	2.301.646.755,00	41,47	
					50.000.000,00	15.120.000,00	30,24	
					202.000.000,00	28.738.950,00	14,23	
					1.202.000.000,00	229.103.638,00	19,06	
					15.015.853.000,00	601.067.202,00	4,00	

4.	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	0,63	0,47	74,60	10.377.151.963,00	5.205.303.450,00	50,16	
					1.000.000.000,00	999.976.382,00	100,00	
					1.611.500.000,00	861.500.000,00	53,46	
					7.765.651.963,00	3.343.827.068,00	43,06	
					21.902.200.000,00	8.415.768.274,00	38,42	
					92.000.000,00	12.941.000,00	14,07	
					2.127.000.000,00	1.089.495.088,00	51,22	
					182.000.000,00	43.650.000,00	23,98	
					19.501.200.000,00	7.269.682.186,00	37,28	
					7.022.282.285,00	909.807.359,00	12,96	
					2.150.000.000,00	181.244.166,00	8,43	
					2.939.635.180,00	395.190.588,00	13,44	
					483.304.945,00	188.954.945,00	39,10	
					200.000.000,00	0,00	0,00	
					1.249.342.160,00	144.417.660,00	11,56	
					220.000.000,00	35.791.238,00	16,27	
					220.000.000,00	35.791.238,00	16,27	
					7.124.185.800,00	504.973.565,00	7,09	
					637.400.000,00	21.750.000,00	3,41	
					487.572.000,00	17.843.800,00	3,66	
					2.000.000.000,00	165.657.243,00	8,28	
					160.802.000,00	0,00	0,00	
					550.000.000,00	69.140.044,00	12,57	
					734.392.000,00	3.850.000,00	0,52	
					100.000.000,00	0,00	0,00	
					1.074.821.800,00	197.747.800,00	18,40	
					100.000.000,00	10.033.378,00	10,03	
					789.198.000,00	0,00	0,00	
					50.000.000,00	0,00	0,00	
					200.000.000,00	980.000,00	0,49	
					100.000.000,00	0,00	0,00	
					140.000.000,00	17.971.300,00	12,84	
					267.350.039.197,00	74.289.032.878,00	27,79	

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI TRIWULAN II [Rp.]	% CAPAIAN TRIWULAN II	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN TW II				
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		50,00	28,36	56,72	260.005.853.397,00	73.748.268.075,00	28,36	
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,00	15,41	30,82	800.000.000,00	123.247.989,00	15,41	
	1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,00	21,16	42,32	300.000.000,00	63.487.180,00	21,16	
	1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50,00	13,56	27,12	200.000.000,00	27.114.654,00	13,56	
	1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,00	10,88	21,76	300.000.000,00	32.646.155,00	10,88	
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50,00	28,40	56,80	190.356.302.829,00	54.067.228.188,00	28,40	
	2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50,00	28,45	56,90	189.812.802.829,00	53.996.637.543,00	28,45	
	2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50,00	0,00	0,00	243.500.000,00	0,00	0,00	
	2.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	50,00	23,53	47,06	300.000.000,00	70.590.645,00	23,53	
	3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
	3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	50,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
	4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	50,00	22,95	45,90	368.766.000,00	84.626.250,00	22,95	
	4.2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	50,00	0,00	0,00	121.266.000,00	0,00	0,00	
	4.3	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	50,00	54,69	109,38	60.000.000,00	32.816.700,00	54,69	
	4.4	Pengolahan Data Retribusi Daerah	50,00	29,63	59,26	144.500.000,00	42.809.550,00	29,63	
	4.5	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	50,00	20,93	41,86	43.000.000,00	9.000.000,00	20,93	
	5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50,00	1,52	3,04	1.864.000.000,00	28.300.000,00	1,52	
	5.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	50,00	0,00	0,00	52.000.000,00	0,00	0,00	
	5.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50,00	3,66	7,32	774.000.000,00	28.300.000,00	3,66	



		5.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50,00	0,00	0,00	888.000.000,00	0,00	0,00	
		5.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
	6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		50,00	18,01	36,02	27.287.150.320,00	4.913.986.565,00	18,01	
		6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50,00	43,24	86,48	833.172.720,00	360.265.720,00	43,24	
		6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,00	9,07	18,14	1.099.750.000,00	99.750.000,00	9,07	
		6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50,00	0,00	0,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
		6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,00	49,46	98,92	2.584.374.600,00	1.278.294.300,00	49,46	
		6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50,00	41,47	82,94	5.550.000.000,00	2.301.646.755,00	41,47	
		6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50,00	30,24	60,48	50.000.000,00	15.120.000,00	30,24	
		6.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50,00	14,23	28,46	202.000.000,00	28.738.950,00	14,23	
		6.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,00	19,06	38,12	1.202.000.000,00	229.103.638,00	19,06	
		6.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50,00	4,00	8,00	15.015.853.000,00	601.067.202,00	4,00	
	7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		50,00	50,16	100,32	10.377.151.963,00	5.205.303.450,00	50,16	
		7.1	Pengadaan Mebel	50,00	100,00	200,00	1.000.000.000,00	999.976.382,00	100,00	
		7.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,00	53,46	106,92	1.611.500.000,00	861.500.000,00	53,46	
		7.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50,00	43,06	86,12	7.765.651.963,00	3.343.827.068,00	43,06	
	8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		50,00	38,42	76,84	21.902.200.000,00	8.415.768.274,00	38,42	
		8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50,00	14,07	28,14	92.000.000,00	12.941.000,00	14,07	
		8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50,00	51,22	102,44	2.127.000.000,00	1.089.495.088,00	51,22	
		8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,00	23,98	47,96	182.000.000,00	43.650.000,00	23,98	
		8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50,00	37,28	74,56	19.501.200.000,00	7.269.682.186,00	37,28	
	9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		50,00	12,96	25,92	7.022.282.285,00	909.807.359,00	12,96	
		9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50,00	8,43	16,86	2.150.000.000,00	181.244.166,00	8,43	
		9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50,00	13,44	26,88	2.939.635.180,00	395.190.588,00	13,44	
		9.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,00	39,10	78,20	483.304.945,00	188.954.945,00	39,10	
		9.4	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	50,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
		9.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50,00	11,56	23,12	1.249.342.160,00	144.417.660,00	11,56	

II.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			50,00	16,27	32,54	220.000.000,00	35.791.238,00	16,27
	1.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		50,00	16,27	32,54	220.000.000,00	35.791.238,00	16,27
		1.1	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	50,00	16,27	32,54	220.000.000,00	35.791.238,00	16,27
III.	Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah			50,00	7,09	14,18	7.124.185.800,00	504.973.565,00	7,09
	1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		50,00	7,09	14,18	7.124.185.800,00	504.973.565,00	7,09
		1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	50,00	3,41	6,82	637.400.000,00	21.750.000,00	3,41
		1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	50,00	3,66	7,32	487.572.000,00	17.843.800,00	3,66
		1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	50,00	8,28	16,56	2.000.000.000,00	165.657.243,00	8,28
		1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	50,00	0,00	0,00	160.802.000,00	0,00	0,00
		1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	50,00	12,57	25,14	550.000.000,00	69.140.044,00	12,57
		1.6	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	50,00	0,52	1,04	734.392.000,00	3.850.000,00	0,52
		1.7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	50,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		1.8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	50,00	18,40	36,80	1.074.821.800,00	197.747.800,00	18,40
		1.9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	50,00	10,03	20,06	100.000.000,00	10.033.378,00	10,03
		1.10	Penagihan Pajak Daerah	50,00	0,00	0,00	789.198.000,00	0,00	0,00
		1.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		1.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	50,00	0,49	0,98	200.000.000,00	980.000,00	0,49
		1.13	Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	50,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		1.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	50,00	12,84	25,68	140.000.000,00	17.971.300,00	12,84
	JUMLAH						267.350.039.197,00	74.289.032.878,00	27,79

A. Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi :

1. Pengukuran Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

a. Capaian Keluaran

1) Pengukuran Capaian Keluaran (Output) Program dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik (Π) berdasarkan rata-rata ukur secara geometrik Π) perbandingan antara realisasi indikator dan target indikator. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$CKP = \prod_{i=1}^m \left(\left(\prod_{m}^n \frac{Realisasi\ Indikator\ i}{Target\ Indikator\ i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \times 100\%$$

Keterangan :

CKP : Capaian Keluaran (*Output*) Program

m : Jumlah Keluaran (*Output*) Program

n : Jumlah Indikator Keluaran (*Output*) Program

Capaian Keluaran (Output) Program (CKP)	Indikator Keluaran (Output) Program (IKP)		
	IKP	Target (TIKP)	Realisasi (RIKP)
CKP 1	IKP 1	50,00	28,36
CKP 2	IKP 2	50,00	16,27
CKP 3	IKP 3	50,00	7,09

$$CKP = \left(\left(\left(\frac{28,36}{50,00} \right) \times \left(\frac{16,27}{50,00} \right) \times \left(\frac{7,09}{50,00} \right) \right)^{\frac{1}{3}} \right) \times 100\%$$

$$CKP = \left((0,5672 \times 0,3254 \times 0,1418)^{\frac{1}{3}} \right) \times 100\%$$

$$CKP = 29,68\%$$

2) Pengukuran Capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometric (Π) dari perkalian antara perbandingan realisasi dan target volume keluaran dengan rata-rata ukur secara geometric (Π) perbandingan antara capaian dan target indikator. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$CKK = \prod_{i=1}^m \left(\left(\frac{RVK\ ke\ i}{TVK\ ke\ i} \times \left(\prod_{j=1}^n \frac{Realisasi\ Indikator\ i}{Target\ Indikator\ i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)$$

Keterangan :

- CKK : Capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan
- RVK : Realisasi Volume Keluaran (*Output*) Kegiatan
- TVK : Target Volume Keluaran (*Output*) Kegiatan
- m : Jumlah Keluaran (*Output*) Kegiatan
- n : Jumlah Indikator Keluaran (*Output*) Kegiatan

Capaian Keluaran (Output) Kegiatan (CKK)	Volume		Indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan (IKK)		
	Target (TVK)	Realisasi (RVK)	IKK	Target (TIKK)	Realisasi (RIKK)
Keluaran 1 (SDM)	423	415	IKK ke 1	50,00	28,40
			IKK ke 2	35,00	13,00
Keluaran 2 (Laporan)	64	16	IKK ke 1	3,00	1,00
			IKK ke 2	4,00	1,00
			IKK ke 3	1,00	1,00
			IKK ke 4	1,00	1,00
			IKK ke 5	1,00	1,00
			IKK ke 6	1,00	1,00
			IKK ke 7	1,00	1,00
			IKK ke 8	1,00	1,00
			IKK ke 9	13,00	4,00
			IKK ke 10	3,00	1,00
			IKK ke 11	3,00	1,00
			IKK ke 12	2,00	1,00
			IKK ke 13	29,00	6,00
			IKK ke 14	1,00	1,00
Keluaran 3 (Dokumen)	58	13	IKK ke 1	2,00	1,00
			IKK ke 2	1,00	1,00
			IKK ke 3	1,00	1,00
			IKK ke 4	1,00	1,00
			IKK ke 5	1,00	1,00
			IKK ke 6	1,00	1,00
			IKK ke 7	1,00	1,00
			IKK ke 8	1,00	1,00
			IKK ke 9	2,00	1,00
			IKK ke 10	2,00	1,00
			IKK ke 11	1,00	1,00
			IKK ke 12	12,00	4,00
			IKK ke 13	29,00	6,00
			IKK ke 14	1,00	1,00
			IKK ke 15	2,00	1,00

$$CKK = \left(\left(\frac{423}{415} \times \left(\frac{28,40}{50} \times \frac{13}{35} \right)^{\frac{1}{2}} \right) \times \left(\frac{16}{64} \times \left(\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{4}{13} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{6}{29} \times \frac{1}{1} \right)^{\frac{1}{14}} \right) \times \right.$$

$$\left. \left(\frac{13}{58} \times \left(\frac{1}{2} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{1} \times \frac{4}{12} \times \frac{6}{29} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{15}} \right) \times 100 \, \%\right.$$

$$CKK = 15,00 \, \%$$

b. Penyerapan Anggaran

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$P = \frac{RA}{PA} \times 100 \, \%$$

Keterangan :

P : Penyerapan Anggaran
RA : Akumulasi Realisasi Anggaran
PA : Akumulasi Pagu Anggaran

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		260.005.853.397,00	73.748.268.075,00	28,36
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	800.000.000,00	123.247.989,00	15,41
	1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000.000,00	63.487.180,00	21,16
	1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	200.000.000,00	27.114.654,00	13,56
	1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000.000,00	32.646.155,00	10,88
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	190.356.302.829,00	54.067.228.188,00	28,40
	2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	189.812.802.829,00	53.996.637.543,00	28,45
	2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	243.500.000,00	0,00	0,00
	2.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	300.000.000,00	70.590.645,00	23,53
	3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.000.000,00	0,00	0,00
	3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.000.000,00	0,00	0,00
	4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	368.766.000,00	84.626.250,00	22,95
	4.1	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	121.266.000,00	0,00	0,00
	4.2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	60.000.000,00	32.816.700,00	54,69
	4.3	Pengolahan Data Retribusi Daerah	144.500.000,00	42.809.550,00	29,63
	4.4	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	43.000.000,00	9.000.000,00	20,93
	5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.864.000.000,00	28.300.000,00	1,52
	5.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	52.000.000,00	0,00	0,00
	5.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	774.000.000,00	28.300.000,00	3,66
	5.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	888.000.000,00	0,00	0,00
	5.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000,00	0,00	0,00
	6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.287.150.320,00	4.913.986.565,00	18,01
	6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	833.172.720,00	360.265.720,00	43,24
	6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.099.750.000,00	99.750.000,00	9,07
	6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	750.000.000,00	0,00	0,00
	6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.584.374.600,00	1.278.294.300,00	49,46
	6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.550.000.000,00	2.301.646.755,00	41,47
	6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	15.120.000,00	30,24
	6.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	202.000.000,00	28.738.950,00	14,23
	6.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.202.000.000,00	229.103.638,00	19,06
	6.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15.015.853.000,00	601.067.202,00	4,00
	7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.377.151.963,00	5.205.303.450,00	50,16
	7.1	Pengadaan Mebel	1.000.000.000,00	999.976.382,00	100,00
	7.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.611.500.000,00	861.500.000,00	53,46
	7.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.765.651.963,00	3.343.827.068,00	43,06

	8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.902.200.000,00	8.415.768.274,00	38,42
	8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	92.000.000,00	12.941.000,00	14,07
	8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.127.000.000,00	1.089.495.088,00	51,22
	8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	182.000.000,00	43.650.000,00	23,98
	8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.501.200.000,00	7.269.682.186,00	37,28
	9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.022.282.285,00	909.807.359,00	12,96
	9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.150.000.000,00	181.244.166,00	8,43
	9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.939.635.180,00	395.190.588,00	13,44
	9.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	483.304.945,00	188.954.945,00	39,10
	9.4	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	200.000.000,00	0,00	0,00
	9.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.249.342.160,00	144.417.660,00	11,56
II.		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	220.000.000,00	35.791.238,00	16,27
	1.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	220.000.000,00	35.791.238,00	16,27
	1.1	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	220.000.000,00	35.791.238,00	16,27
III.		Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah	7.124.185.800,00	504.973.565,00	7,09
	1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.124.185.800,00	504.973.565,00	7,09
	1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	637.400.000,00	21.750.000,00	3,41
	1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	487.572.000,00	17.843.800,00	3,66
	1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2.000.000.000,00	165.657.243,00	8,28
	1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	160.802.000,00	0,00	0,00
	1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	550.000.000,00	69.140.044,00	12,57
	1.6	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	734.392.000,00	3.850.000,00	0,52
	1.7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	100.000.000,00	0,00	0,00
	1.8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.074.821.800,00	197.747.800,00	18,40
	1.9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	100.000.000,00	10.033.378,00	10,03
	1.10	Penagihan Pajak Daerah	789.198.000,00	0,00	0,00
	1.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00
	1.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	200.000.000,00	980.000,00	0,49
	1.13	Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100.000.000,00	0,00	0,00
	1.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	140.000.000,00	0,00	0,00
		JUMLAH	267.350.039.197,00	74.289.032.878,00	27,79

c. Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100 \%$$

- Keterangan :
- E : Efisiensi
 - PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i
 - RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i
 - CKi : Capaian Keluaran i

Keluaran (Output) Kegiatan	Capaian Keluaran (Output) Kegiatan	Anggaran	
		Pagu (PAK)	Realsasi (RAK)
Keluaran 1 (dokumen)	2,00	800.000.000,00	123.247.989,00
Keluaran 2 (SDM)	0.98	190.356.302.829,00	54.067.228.188,00
Keluaran 3 (dokumen)	0,00	28.000.000,00	0,00
Keluaran 4 (dokumen)	1,00	368.766.000,00	84.626.250,00
Keluaran 5 (SDM)	5,00	1.864.000.000,00	28.300.000,00
Keluaran 6 (laporan)	3,00	27.287.150.320,00	4.913.986.565,00
Keluaran 7 (unit)	1,00	10.377.151.963,00	5.205.303.450,00
Keluaran 8 (laporan)	2,00	21.902.200.000,00	8.415.768.274,00
Keluaran 9 (unit)	1,00	7.022.282.285,00	909.807.359,00
Keluaran 10 (laporan)	1,00	220.000.000,00	35.791.238,00
Keluaran 11 (dokumen)	2,00	7.124.185.800,00	504.973.565,00

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{11} ((800.000.000 \times 2) - 123.247.989) + ((190.356.302.829 \times 0.98) - 54.067.228.188) + \dots + ke\ 11}{\sum_{i=1}^{11} ((800.000.000 \times 2) + (190.356.302.829 \times 0.98) + \dots + ke - 11)} \times 100 \%$$

E = 79,10

Keterangan :

Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah (20%) .

d. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan

Pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilakukan dengan menghitung rata-rata dari perbandingan antara hasil pengurangan akumulasi rencana penarikan dana dengan deviasi realisasi anggaran dan rencana penarikan dana kumulatif. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{RPDKn - |RPDKn - RAKn|}{RPDKn} \times 100 \% \right)}{n}$$

Keterangan :

- K : Konsistensi penyerapan anggaran terhadap Perencanaan
- RAK : Realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan ke i
- RPDK : Rencana penarikan dana kumulatif sampai dengan bulan ke n
- n : Jumlah bulan

Bulan	RPD	RPD Kumulatif	Realisasi Anggaran (RA)	RA Kumulatif
Januari	79.980.255.195,00	79.980.255.195,00	2.043.632.348,00	2.043.632.348,00
Februari	34.629.916.405,00	114.610.171.600,00	4.627.203.156,00	6.670.835.504,00
Maret	30.058.709.300,00	144.668.880.900,00	7.097.016.377,00	13.749.851.881,00
April	36.141.926.197,00	180.810.807.097,00	35.572.103.417,00	49.321.955.298,00
Mei	19.254.345.500,00	200.065.152.597,00	9.233.004.684,00	58.554.959.982,00
Juni	25.934.367.500,00	225.999.520.097,00	15.716.072.896,00	74.271.032.878,00
Juli	12.881.828.000,00	238.881.348.097,00		
Agustus	8.404.547.700,00	247.285.895.797,00		
September	8.404.547.700,00	255.690.443.497,00		
Oktober	11.659.595.700,00	267.350.039.197,00		
November	0,00	267.350.039.197,00		
Desember	0,00	267.350.039.197,00		

Dari tabel diatas, dapat dihitung nilai konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebagai berikut :

- RPDK bulan Januari (1) = 79.980.255.195,00
- RAK bulan Januari = 2.043.632.348,00

$$K = \left(\frac{\frac{79.980.255.195,00 - |79.980.255.195,00 - 2.043.632.348,00|}{79.980.255.195,00}}{1} \right) \times 100 \%$$

$$K = 2,55$$

Dengan metode analisis perhitungan yang sama, maka didapat nilai konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan per bulan sebagai berikut :

Bulan	Tingkat Konsistensi per Bulan (%)
Januari	2,55
Februari	5,82
Maret	9,50
April	27,28
Mei	29,27
Juni	32,86
Juli	
Agustus	
September	
Oktober	
November	
Desember	

Dari tabel di atas, pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan adalah sebagai berikut :

$$K = \frac{2,55 + 5,82 + 9,50 + 27,28 + 29,27 + 32,86}{6}$$
$$K = 17,88$$

2. Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi Untuk mendapatkan nilai Kinerja, maka seluruh indikator (penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, pencapaian keluaran, dan efisiensi) harus memiliki skala yang sama, yaitu dari 0%-100%. Dari keempat variabel pengukuran tersebut variabel efisiensi tidak memiliki skala 0% - 100%. Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai dalam rumus efisiensi sebesar (20%) dan nilai paling tinggi sebesar 20% . Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100%, dengan rumus sebagai berikut :

$$NE = 50 \% + (\frac{E}{20} \times 50)$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah nilai skala maksimal (100%) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah skala minimal (0%).

Dari hasil analisa, bahwa efisiensi yang diperoleh (E) = 79,10 %, maka nilai efisiensi :

$$NE = 50\% + \left(\frac{0,7910}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 2,4775$$

Selanjutnya, nilai Kinerja atas Aspek Implementasi dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara hasil pengukuran setiap variabel Aspek Implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat program atau satuan kerja. Rumus dari perhitungan tersebut sebagai berikut :

$$NKI = (P \times Wp) + (K \times Wk) + (CKP \text{ atau } CKK \times Wck) + (NE \times We)$$

Keterangan :

- NKI : Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi
- P : Penyerapan Anggaran
- K : Konsistensi penyerapan anggaran terhadap Perencanaan
- CKP : Capaian Keluaran (*Output*) Program
- CKK : Capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan
- NE : Nilai efisiensi
- Wp : Bobot penyerapan anggaran
- Wk : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
- Wck : Bobot capaian keluaran
- We : Bobot efisiensi

Dimana, bobot masing – masing variabel aspek implementasi sebagai berikut :

- Wp : 9,7 %
- Wk : 18,2 %
- Wck : 43,5 %
- We : 28,6 %

$$\text{Maka nilai (NKI) : } (P \times Wp) + (K \times Wk) + (CKP \times Wck) + (NE \times We)$$

$$NKI : (27,79 \% \times 9,7 \%) + (17,88 \% \times 18,2 \%) + (29,68 \% \times 43,5 \%) + (2,4775 \% \times 28,6 \%)$$

$$NKI : 19,57 \%$$

Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan dari Perangkat Daerah tersebut sebesar 19,57 %, maka nilai Kinerja atas Aspek Implementasi Perangkat Daerah tersebut termasuk kategori Baik.

B. Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran Strategis

Capaian sasaran strategis dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik (Π) berdasarkan rata-rata ukur secara geometrik (Π) perbandingan antara capaian indikator Sasaran Strategis dan target indikator Sasaran Strategis. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$CSS = \prod_{i=1}^m (((\prod_{j=1}^n \frac{Capaian\ Indikator\ Sasaran\ Strategis\ i}{Target\ Indikator\ Sasaran\ Strategis\ i})^{\frac{1}{n}})^{\frac{1}{m}}) \times 100 \%$$

Keterangan :

CSS : Capaian Sasaran Strategis

m : Jumlah Sasaran Strategis

n : Jumlah Indikator Sasaran Strategis

Sasaran Strategis / Outcomes	Indikator Sasaran Strategis (IKSS)		
	IKSS	Target (TIKSS)	Realisasi (RIKSS)
Sasaran Strategis 1 (SS.1)	IKSS ke 1	38,56	34,63
Sasaran Strategis 2 (SS.2)	IKSS ke 2	1,57	1,23
Sasaran Strategis 3 (SS.3)	IKSS ke 3	0,24	0,194
	IKSS ke 4	0,63	0,47

$$CSS = \left(\left(\left(\left(\left(\frac{34,63}{38,56} \right)^{\frac{1}{2}} \times \left(\frac{1,23}{1,57} \right)^{\frac{1}{2}} \times \left(\frac{0,24}{0,194} \times \frac{0,47}{0,63} \right)^{\frac{1}{2}} \right) \right) \right) \right) \times 100 \%$$

$$CSS = 15,54$$

2. Capaian Sasaran Program

Capaian Sasaran Program dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik (Π) berdasarkan rata-rata ukur secara geometrik (Π) perbandingan antara capaian indikator Sasaran Program dan target indikator Sasaran Program. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$CSP = \prod_{i=1}^m \left(\left(\prod_{j=1}^n \frac{Capaian\ Indikator\ Sasaran\ Program\ i}{Target\ Indikator\ Sasaran\ Program\ i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \times 100\%$$

Keterangan :

- CSP : Capaian Sasaran Program
- m : Jumlah Sasaran Program
- n : Jumlah Indikator Sasaran Program

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (ISP)		
	ISP	Target (ISP)	Realisasi (RISP)
Outcomes Program 1	ISP	50,00	28,36
Outcomes Program 2	ISP	50,00	16,27
Outcomes Program 3	ISP	50,00	7,09

$$CSP = \left(\left(\left(\frac{28,36}{50,00} \right) \times \left(\frac{16,27}{50,00} \right) \times \left(\frac{7,09}{50,00} \right) \right) \right) \times 100\%$$

$$CSP = 2,62$$

C. Penilaian Kinerja Anggaran Perangkat Daerah

1. Penilaian Kinerja Tingkat Perangkat Daerah

Penilaian Kinerja tingkat Perangkat Daerah dilakukan dengan menghitung rata-rata dari nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat tingkat Perangkat Daerah dan rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat eselon III / program lingkup kewenangan Perangkat Daerah. Rumus pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$NKK = \frac{CSS + rata - rata\ nilai\ kinerja\ anggaran\ tingkat\ eselon\ III / Program}{2}$$

Keterangan :

- NKK : Nilai Kinerja tingkat Perangkat Daerah
- CSS : Capaian Sasaran Strategis/Nilai Kinerja Perangkat Daerah atas Aspek Manfaat

$$NKK = \frac{15,54 \% + 2,62 \%}{2}$$

$$NKK = 9,08 \%$$

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Perangkat Daerah tersebut sebesar 9,08 %, maka nilai Kinerja Perangkat Daerah tersebut termasuk kategori Baik.

2. Penilaian Kinerja Tingkat Program

Penilaian Kinerja tingkat eselon III/program dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat dan Aspek Implementasi tingkat eselon III/program dan rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja lingkup kewenangan eselon III/program terkait.

Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat dan Aspek Implementasi tingkat eselon III/program dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat eselon III/program dan nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat tingkat eselon III/program dengan bobot masing-masing aspek evaluasi Kinerja Anggaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Nilai Kinerja atas Aspek Manfaat dan Implementasi} = (NKI \times Wi) + (CSP \times Wm)$$

Keterangan :

NKI : Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi

Wi : Bobot Aspek Implementasi

Wm : Bobot Aspek Manfaat

Bobot masing – masing aspek sebagai berikut :

Aspek Implementasi (Wi) = 33,3 %, terdiri dari :

Wp : 9,7 %

Wk : 18,2 %

Wck : 43,5 %

We : 28,6 %

Aspek Manfaat (Wm) = 66,7 %

$$(NKI \times Wi) + (CSP \times Wm) = (19,57 \% \times 33,3 \%) + (9,08 \% \times 66,7 \%) = 12,57 \%$$

Nilai Kinerja Anggaran tingkat eselon III/program tersebut sebesar 12,57 %, maka nilai Kinerja eselon III/program tersebut termasuk kategori Baik.



Kesimpulan dan Saran Rekomendasi

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisa indikator kinerja dengan menggunakan teknik analisa data eviews versi 13, capaian kinerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. Kinerja unit eselon III (IKSSO Level 1) memberikan kontribusi terhadap kinerja unit eselon II (IKSS) sebesar (%) :

	$\Delta (lnIKSS1)$	$\Delta (lnIKSS2)$	$\Delta (lnIKSS3)$	$\Delta (lnIKSS4)$	$\Delta (lnIKSS5)$	$\Delta (lnIKSS6)$
$\Delta (lnIKSS01)$	24.17	29.33	31.01	28.76	30.52	26.42
$\Delta (lnIKSS02)$	29.37	27.48	33.51	36.18	23.15	32.26
$\Delta (lnIKSS03)$	27.45	32.53	30.14	26.24	29.83	24.63
$\Delta (lnIKSS04)$	27.46	28.22	31.27	32.16	31.64	33.16
$\Delta (lnIKSS05)$	26.19	31.08	24.26	28.28	23.58	24.35
$\Delta (lnIKSS06)$	32.45	33.19	28.65	31.12	29.76	32.36
$\Delta (lnIKSS07)$	26.00	32.82	28.62	35.18	22.45	29.41

2. Kinerja unit eselon IV (IKSSO Level 2) memberikan konstribusi terhadap kinerja unit eselon III (IKSSO Level 1) sebesar (%) :

	$\Delta (lnIKSS01)$	$\Delta (lnIKSS02)$	$\Delta (lnIKSS03)$	$\Delta (lnIKSS04)$	$\Delta (lnIKSS05)$	$\Delta (lnIKSS06)$	$\Delta (lnIKSS07)$
$\Delta (lnIKSS08)$	36.69	25.71	33.73	27.12	28.58	25.33	31.05
$\Delta (lnIKSS09)$	31.32	27.74	29.10	24.28	24.25	34.51	32.65
$\Delta (lnIKSS010)$	27.37	24.64	26.10	26.63	25.71	33.62	29.34
$\Delta (lnIKSS011)$	32.13	25.20	30.24	27.18	34.15	36.26	33.34
$\Delta (lnIKSS012)$	26.18	25.18	27.13	24.15	32.31	28.21	34.81
$\Delta (lnIKSS013)$	25.73	28.92	26.84	25.75	26.72	29.60	36.51
$\Delta (lnIKSS014)$	35.61	32.82	28.28	27.46	27.71	23.32	24.45
$\Delta (lnIKSS015)$	28.36	24.36	21.83	22.63	27.21	26.65	27.38
$\Delta (lnIKSS016)$	23.34	32.27	32.24	27.20	27.67	24.38	31.34
$\Delta (lnIKSS017)$	30.17	23.66	26.71	31.32	30.63	29.63	24.48
$\Delta (lnIKSS018)$	32.41	31.52	35.18	28.32	30.11	33.13	35.54

Δ (lnIKSS019)	29.52	28.43	36.19	32.32	27.77	25.51	26.69
Δ (lnIKSS020)	28.65	28.12	25.23	31.42	31.52	28.53	27.72
Δ (lnIKSS021)	24.82	32.32	29.14	23.61	28.76	31.25	35.23
Δ (lnIKSS022)	26.16	29.26	30.41	27.65	35.31	26.92	27.72
Δ (lnIKSS023)	27.23	32.00	32.13	24.48	25.16	23.26	24.23
Δ (lnIKSS024)	24.62	31.63	34.62	35.56	34.41	34.19	29.65
Δ (lnIKSS025)	24.16	27.16	25.67	25.62	23.36	24.77	28.78
Δ (lnIKSS026)	28.28	26.57	24.47	27.32	21.73	25.95	31.29
Δ (lnIKSS027)	21.29	34.14	25.56	26.68	24.49	29.64	32.66

3. Nilai kinerja Perangkat Daerah atas Aspek Implementasi diperoleh nilai sebesar (NKI = 19,57 %) dengan kategori Rendah.
4. Nilai kinerja Perangkat Daerah atas Aspek Manfaat (Capaian Sasaran Strategis (CSS = 15,54 %, dengan kategori Rendah)) sementara (Capaian Sasaran Program (CSP = 2,62 %, dengan kategori Sangat Rendah));
5. Nilai kinerja anggaran tingkat Perangkat Daerah atas Aspek Manfaat (NKK = 9,08 %, dengan kategori Rendah) sementara nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan program bernilai 12,57 % dengan kategori Rendah.

B. Saran Rekomendasi

Berdasarkan capaian kinerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah yang telah dicapai pada Triwulan II (April – Mei - Juni) tahun 2025, berikut saran dan rekomendasi dalam rangka menjaga kesinambungan kinerja yang perlu ditingkatkan pada Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut :

1. Terhadap nilai kinerja Perangkat Daerah atas Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat :
 - a. meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan;
 - b. menentukan target Kinerja tahun anggaran selanjutnya sehubungan dengan ketersediaan anggaran;
 - c. mengantisipasi kendala dan faktor pendukung yang dapat mempengaruhi ketercapaian target Kinerja;
 - d. menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target Kinerja;

2. Meningkatkan kinerja dengan pola kerja kolaboratif (internal dan eksternal) untuk meningkatkan kinerja (tujuan dan sasaran strategis) dengan kinerja *cross cutting* sebagai berikut :
- a. Kinerja *cross cutting* (%) Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO Level 1) terhadap Indikator Kinerja Sasaran Strategis Eselon II :

	$\Delta (lnIKSS1)$	$\Delta (lnIKSS2)$	$\Delta (lnIKSS3)$	$\Delta (lnIKSS4)$	$\Delta (lnIKSS5)$	$\Delta (lnIKSS6)$
$\Delta (lnIKSS01)$	11.63	19.27	21.73	12.44	18.25	18.27
$\Delta (lnIKSS02)$	14.28	14.17	16.37	14.74	13.25	15.43
$\Delta (lnIKSS03)$	16.18	16.18	13.34	14.74	17.27	16.82
$\Delta (lnIKSS04)$	13.24	12.27	14.21	14.13	15.14	14.16
$\Delta (lnIKSS05)$	15.62	14.29	17.16	17.32	15.12	13.14
$\Delta (lnIKSS06)$	13.26	14.38	14.72	13.42	12.38	16.51
$\Delta (lnIKSS07)$	12.32	13.18	15.62	14.41	18.25	16.38

- b. Kinerja *cross cutting* (%) Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO Level 2) terhadap Indikator Kinerja Sasaran Strategis Eselon III :

	$\Delta (lnIKSS01)$	$\Delta (lnIKSS02)$	$\Delta (lnIKSS03)$	$\Delta (lnIKSS04)$	$\Delta (lnIKSS05)$	$\Delta (lnIKSS06)$	$\Delta (lnIKSS07)$
$\Delta (lnIKSS08)$	23.71	30.18	32.15	32.52	31.26	27.18	28.35
$\Delta (lnIKSS09)$	28.26	32.13	23.24	25.87	32.62	23.48	27.81
$\Delta (lnIKSS010)$	32.34	31.72	32.42	33.24	30.32	25.26	29.16
$\Delta (lnIKSS011)$	23.24	24.71	32.32	23.29	26.38	25.16	32.31
$\Delta (lnIKSS012)$	24.26	24.26	32.18	32.62	28.45	27.40	26.40
$\Delta (lnIKSS013)$	24.51	25.42	26.14	24.12	22.47	26.13	45.23
$\Delta (lnIKSS014)$	24.14	27.28	26.14	30.14	32.62	24.66	25.42
$\Delta (lnIKSS015)$	29.24	25.54	33.72	31.38	32.61	33.25	32.62
$\Delta (lnIKSS016)$	36.17	33.15	27.67	32.21	27.23	24.32	28.26
$\Delta (lnIKSS017)$	30.87	26.64	35.25	34.24	32.23	29.23	34.51
$\Delta (lnIKSS018)$	20.52	31.43	24.65	32.74	24.32	32.45	33.15
$\Delta (lnIKSS019)$	31.24	32.87	23.32	26.61	23.28	26.82	25.65
$\Delta (lnIKSS020)$	32.65	31.28	34.64	28.54	28.58	31.41	30.27
$\Delta (lnIKSS021)$	25.18	26.94	30.82	26.14	31.28	28.45	24.74
$\Delta (lnIKSS022)$	23.35	29.67	31.35	32.42	34.65	31.01	28.62

$\Delta (lnIKSS023)$	32.17	32.16	32.23	28.26	24.53	26.74	25.80
$\Delta (lnIKSS024)$	34.65	33.37	25.36	26.15	26.65	24.21	30.34
$\Delta (lnIKSS025)$	25.15	34.45	34.20	26.24	32.21	25.28	31.22
$\Delta (lnIKSS026)$	31.78	31.42	27.24	31.18	33.59	32.72	28.61
$\Delta (lnIKSS027)$	28.72	26.64	26.62	23.13	24.55	26.33	27.41

3. Melaksanakan pengendalian intern dimulai pada level paling bawah di tingkat operasional staf sampai ke jenjang leveling pimpinan agar permasalahan dan solusi yang tepat dapat diketahui sedini mungkin (*early warning*);

Palembang, 01 Juli 2025



**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

H. AHMAD RIZWAN, S. STP., M. M
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19810923 200012 1 001